



**KABUPATEN
WONOGIRI**

PERUBAHAN RENSTRA 2025-2029

**DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 ini tersusun karena terdapat perubahan pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan ketenagakerjaan dan perindustrian.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan bidang ketenagakerjaan dan perindustrian yang lebih baik di Kabupaten Wonogiri. Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Akhir kata semoga Perubahan RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas dan meningkatkan kualitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.



KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN PERINDUSTRIAN,

WIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197009041998031009

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum.....	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan	I-8
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	II-1
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-1
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	II-1
2.1.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.....	II-13
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.....	II-19
2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ..	II-66
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah...	II-68
2.2.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	II-69
2.2.2 Telaahan Dokumen Lainnya.....	II-72
2.2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.....	II-89
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	III-1
3.1 Tujuan dan Sasaran.....	III-1
3.2 Strategi dan Kebijakan.....	III-5
BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	IV-1
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, OPD.....	IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV-14
BAB V PENUTUP	V-1
5.1 Kesimpulan Penting Substansial.....	V-1
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	V-2
5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan berdasarkan Pemerintah Daerah.....	V-3
5.4 Manajemen Risiko.....	V-4

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	I-3
Gambar 1.2 Konsep Renstra Perangkat Daerah Sesuai InMendagri Nomor 2 Tahun 2025.....	I-3
Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.....	II-2
Gambar 2.2 Grafik Nilai Kematangan Organisasi Disnakerin Kab. Wonogiri.....	II-19
Gambar 2.3 Grafik Nilai SAKIP Disnakerin Kab. Wonogiri.....	II-20
Gambar 2.4 Grafik Indeks Profesionalitas ASN Disnakerin Kab. Wonogiri.....	II-21
Gambar 2.5 Grafik Jumlah ASN Disnakerin yang Menjadi Agen Perubahan.....	II-21
Gambar 2.6 Grafik Indeks Inovasi Disnakerin Kab. Wonogiri.....	II-22
Gambar 2.7 Aktivitas Inovasi Super Gen Z berupa pelatihan yang dilaksanakan secara <i>online</i>	II-23
Gambar 2.8 Aktivitas Inovasi Super Gen Z berupa pelatihan yang dilaksanakan di SMK.....	II-24
Gambar 2.9 Aktivitas Inovasi Super Gen Z berupa pelatihan <i>content creator</i> yang dilaksanakan di UPTD BLK.....	II-24
Gambar 2.10 Aktivitas Inovasi <i>Work Readiness Programe</i> (WRP) berupa pelatihan bagi tenaga pendidik.....	II-25
Gambar 2.11 Grafik IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Disnakerin Kab. Wonogiri.....	II-25
Gambar 2.12 Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Disnakerin Kab. Wonogiri.....	II-26
Gambar 2.13 Grafik Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kab. Wonogiri...	II-26
Gambar 2.14 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Wonogiri.....	II-28
Gambar 2.15 Piagam Penghargaan atas Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terendah ke-I Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.....	II-29
Gambar 2.16 Piagam Penghargaan atas Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terendah ke-II Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.....	II-30
Gambar 2.17 Grafik Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan di Kab. Wonogiri.....	II-30
Gambar 2.18 Grafik Besaran Kompetensi Calon Tenaga Kerja di Kab. Wonogiri.....	II-32
Gambar 2.19 Grafik Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun di Kab. Wonogiri.....	II-33
Gambar 2.20 Grafik Rasio Penduduk yang Berwirausaha di Kab. Wonogiri.....	II-33
Gambar 2.21 Grafik Jumlah Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) di Kab. Wonogiri.....	II-34

Gambar 2.22	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Disnakerin Kab. Wonogiri.....	II-46
Gambar 2.23	Visi Kabupaten Wonogiri 2025-2029.....	II-74
Gambar 2.24	Misi Kabupaten Wonogiri 2025-2029.....	II-75

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tugas dan Fungsi Unit Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.....	II-4
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri 2025.....	II-13
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri 2024.....	II-14
Tabel 2.4 Aset Tanah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.....	II-15
Tabel 2.5 Gedung dan Bangunan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.....	II-16
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2023 (<i>sebelum perubahan nomenklatur SOTK PD</i>).....	II-36
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 (<i>setelah perubahan nomenklatur SOTK PD</i>).....	II-41
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010...	II-47
Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2023 (<i>sebelum perubahan nomenklatur SOTK PD</i>).....	II-50
Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 (<i>setelah perubahan nomenklatur SOTK PD</i>).....	II-55
Tabel 2.11 Rumusan Permasalahan.....	II-68
Tabel 2.12 Prioritas Sektor Industri.....	II-80
Tabel 2.13 Tema Isu KLHS terhadap Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.....	II-86
Tabel 2.14 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai dengan Wewenang Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029.....	II-87
Tabel 2.15 Isu Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029.....	II-88
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.....	III-3
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	III-6
Tabel 3.3 Penahapan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029.....	III-7

Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029.....	IV-2
Tabel 4.2	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029.....	IV-13
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wonogiri 2025-2029.....	IV-15
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wonogiri 2025-2029.....	IV-16
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wonogiri 2025-2029.....	IV-18
Tabel 5.1	Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029.....	V-4

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi di masa depan.

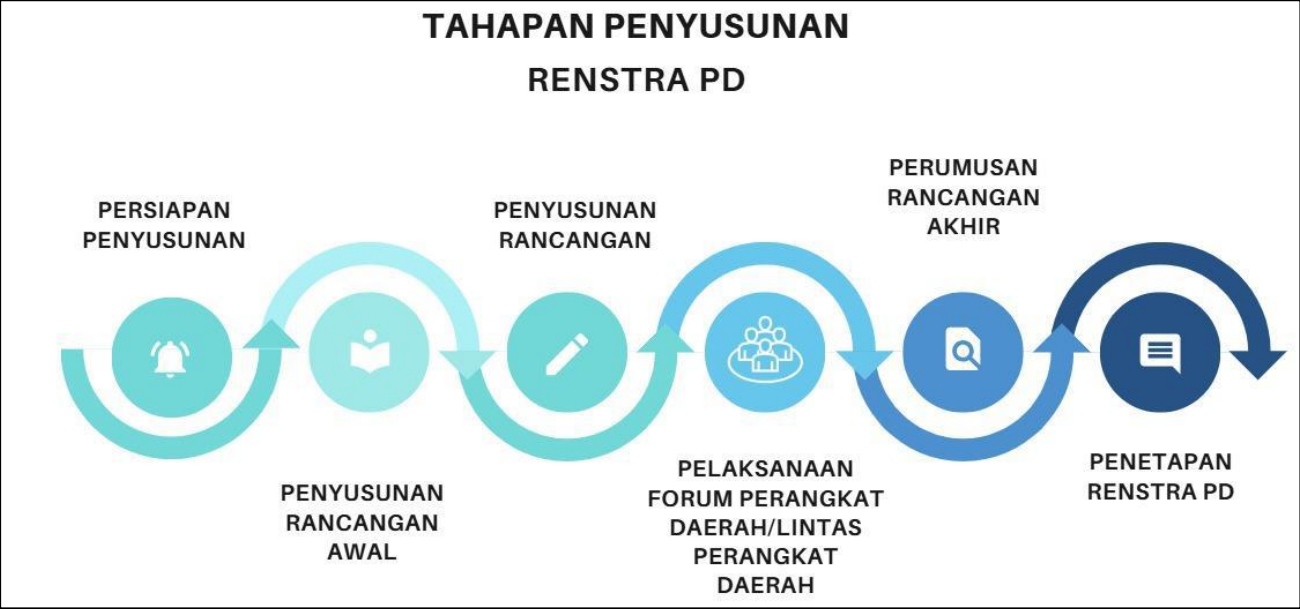
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sesuai makna tersebut maka Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan wajib dan/atau pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam proses penyusunnya perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dan pemangku kepentingan.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 135 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, mulai tahun 2026 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri mengampu 2 (dua) urusan, yakni Urusan Ketenagakerjaan dan Urusan Perindustrian.

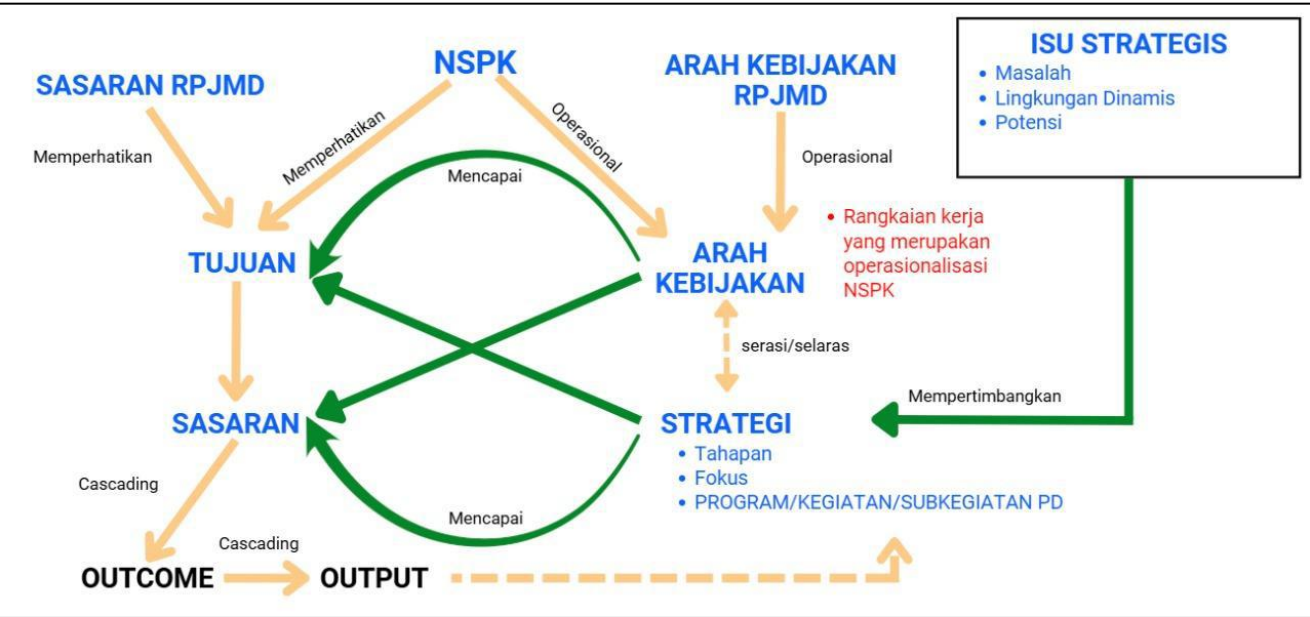
Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah serta perumusan akhir. Dalam penyusunan Rencana Strategis ini yang utama selalu berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang didalamnya telah memuat permasalahan daerah, serta strategi dan kebijakan serta program yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah mempedomani Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, guna menjamin adanya kesesuaian isu pembangunan sektoral yang dibangun antara pemerintah pusat dan daerah. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi pertimbangan juga dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, guna menjamin keserasian perencanaan pembangunan sektoral dan rencana pembangunan keruangan.

Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah tersaji dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD. Konsep Renstra Perangkat Daerah tersaji dalam gambar di bawah.



Gambar 1.2. Konsep Renstra Perangkat Daerah sesuai InMendagri Nomor 2 tahun 2025

1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan di bawah ini, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
4. UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan sebagaimana telah diubah dengan UU

No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
17. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 210);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 135 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan

Perindustrian Kabupaten Wonogiri;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Wonogiri khususnya bidang ketenagakerjaan dan perindustrian yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan

Perindustrian Kabupaten Wonogiri. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB II Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Wonogiri tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Wonogiri tahun 2025-2029.

BAB III Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerjautama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB IV Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembanunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 135 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri, tugas pokok dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

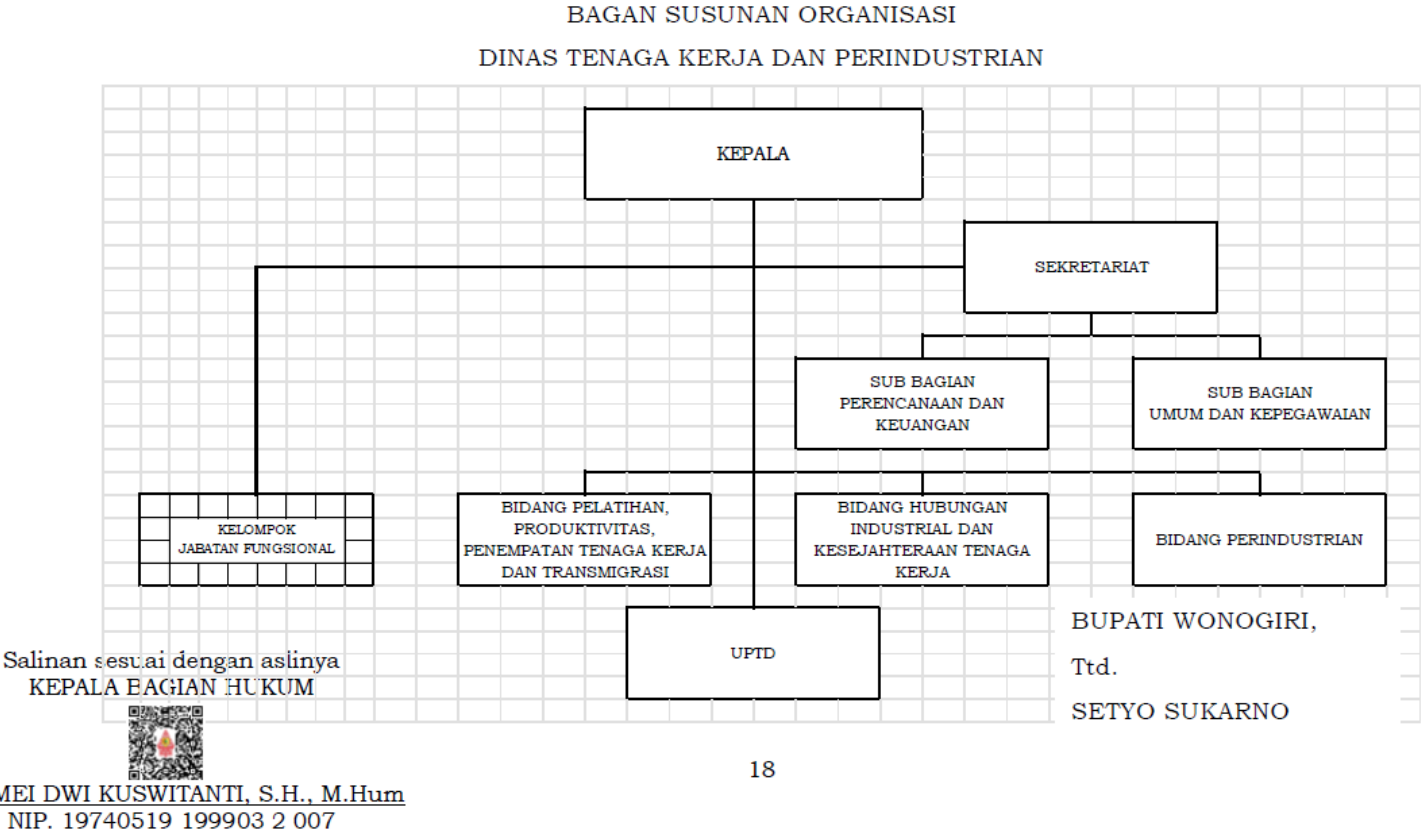
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 135 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN



Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri

b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 135 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri, uraian tugas jabatan struktural Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tugas dan Fungsi Unit Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri

NO.	JABATAN/UNIT ORGANISASI	TUGAS	FUNGSI/URAIAN TUGAS
1.	Kepala Dinas	Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.	a. perumusan kebijakan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi; b. pelaksanaan kebijakan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi; c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi; d. pelaksanaan administrasi dinas bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2.	Sekretariat	Memberikan pelayanan teknis dan administartif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas.	a. pengoordinasian dan penyusunan program, anggaran, dan evaluasi kinerja di lingkungan Dinas, meliputi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah; b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas; c. pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, rumah tangga, aset dan jasa penunjang di lingkungan Dinas; d. pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; e. pengelolaan urusan ASN di lingkungan Dinas; dan

NO.	JABATAN/UNIT ORGANISASI	TUGAS	FUNGSI/URAIAN TUGAS
			f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan berkaitan dengan tugasnya.
3.	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja di bidang perencanaan dan keuangan; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan dan keuangan; c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan keuangan; d. menyiapkan bahan pengoordinasian administratif di bidang perencanaan dan keuangan; e. memberikan pelayanan administratif dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang perencanaan dan keuangan; serta f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan.	a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang perencanaan dan keuangan; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan dan keuangan; c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan keuangan; d. menyiapkan bahan pengoordinasian administratif di bidang perencanaan dan keuangan; e. memberikan pelayanan administratif dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan keuangan, meliputi: 1. administrasi keuangan Perangkat Daerah, meliputi: a) penyediaan gaji dan tunjangan ASN; b) penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN; c) pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD; d) koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD; e) pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; f) koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD/ laporan keuangan akhir tahun SKPD;

NO.	JABATAN/UNIT ORGANISASI	TUGAS	FUNGSI/URAIAN TUGAS
			g) penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran; 2. administrasi pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah; 3. koordinasi penyusunan laporan SPIP; 4. perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, meliputi: a) penyusunan dokumen perencanaan; b) koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD dan perubahan; c) koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD dan perubahan; d) koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; e) evaluasi kinerja perangkat Daerah; 5. pengelolaan data dan informasi; 6. serta kegiatan lain sesuai bidang tugas. f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
4.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja di bidang umum dan kepegawaian; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan	a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang umum dan kepegawaian; b. mengoordinasikan penyusunan produk hukum Daerah

NO.	JABATAN/UNIT ORGANISASI	TUGAS	FUNGSI/URAIAN TUGAS
		teknis operasional di bidang umum dan kepegawaian; c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian; d. menyiapkan bahan pengoordinasian administratif di bidang umum dan kepegawaian; e. memberikan pelayanan administratif dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang umum dan kepegawaian; serta f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian.	di lingkungan Dinas; c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang umum dan kepegawaian; d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian; e. menyiapkan bahan pengoordinasian administratif di bidang umum dan kepegawaian; f. memberikan pelayanan administratif dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang umum dan kepegawaian, meliputi: 1. administrasi barang milik Daerah; 2. administrasi kepegawaian; 3. administrasi umum; 4. pengadaan dan pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah; 5. pengelolaan protokol; 6. laporan pelaksanaan reformasi birokrasi; 7. pelayanan publik dan hubungan masyarakat; 8. organisasi dan tata laksana Perangkat Daerah; serta 9. kegiatan lain sesuai bidang tugasnya; g. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

NO.	JABATAN/UNIT ORGANISASI	TUGAS	FUNGSI/URAIAN TUGAS
5.	Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	a. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian elaksanakan penyiapan bahan program kerja di bidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, kelembagaan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, dan pengelolaan informasi pasar kerja dan transmigrasi; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, kelembagaan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, dan pengelolaan informasi pasar kerja dan transmigrasi; c. pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, kelembagaan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, dan pengelolaan informasi pasar kerja dan transmigrasi; d. pengoordinasian pelaksanaan tugas,	a. penyusunan bahan program kerja di bidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, kelembagaan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, dan pengelolaan informasi pasar kerja dan transmigrasi; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di biang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, kelembagaan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, dan pengelolaan informasi pasar kerja dan transmigrasi; c. pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, kelembagaan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, dan pengelolaan informasi pasar kerja dan transmigrasi meliputi; 1. Kelompok Unsur Kelembagaan, Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja meliputi: a) pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi; b) pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; c) perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja; d) konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil;

NO.	JABATAN/UNIT ORGANISASI	TUGAS	FUNGSI/URAIAN TUGAS
		pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, kelembagaan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, dan pengelolaan informasi pasar kerja dan transmigrasi.	e) pengukuran produktivitas tingkat Kabupaten; 2. Kelompok Unsur Penempatan Tenaga Kerja: a) pelayanan antar kerja di Kabupaten; b) penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Kabupaten; c) perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Kabupaten; d) penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Kabupaten. 3. Kelompok Unsur Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dan Transmigrasi: a) pengelolaan informasi pasar kerja; b) pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi; c) pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian; d. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

NO.	JABATAN/UNIT ORGANISASI	TUGAS	FUNGSI/URAIAN TUGAS
6.	Bidang Hubungan Industrial Dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	a. Melaksanakan penyiapan bahan program kerja di bidang hubungan industrial dan kesejahteraan tenaga kerja; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang hubungan industrial dan kesejahteraan tenaga kerja; c. pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan industrial dan kesejahteraan tenaga kerja; d. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan industrial dan kesejahteraan tenaga kerja.	a. penyusunan bahan program kerja di bidang hubungan industrial dan kesejahteraan tenaga kerja; b. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang hubungan industrial dan kesejahteraan tenaga kerja; c. pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan industrial dan kesejahteraan tenaga kerja., meliputi: 1. Kelompok Unsur Hubungan Industrial: pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Kabupaten; 2. Kelompok Unsur Kesejahteraan Tenaga Kerja: pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Kabupaten. d. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang hubungan industrial dan kesejahteraan tenaga kerja; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang, hubungan industrial dan kesejahteraan tenaga kerja; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
7.	Bidang Perindustrian	a. Melaksanakan penyiapan bahan program kerja di bidang perindustrian, pengembangan industri dan informasi	a. penyusunan bahan program kerja di bidang perindustrian, pengembangan industri dan informasi industri;

NO.	JABATAN/UNIT ORGANISASI	TUGAS	FUNGSI/URAIAN TUGAS
		industri; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang perindustrian, pengembangan industri dan informasi industri; c. pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, pengembangan industri dan informasi industri; d. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perindustrian, pengembangan industri dan informasi industri.	b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang perindustrian, pengembangan industri dan informasi industri; c. pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, pengembangan industri dan informasi industri, meliputi: 1. Kelompok Unsur Pengembangan Industri: penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten, penyusunan, penerapan, dan evaluasi rencana pembangunan industri provinsi dan penyusunan, penerapan, dan evaluasi rencana pembangunan industri provinsi; 2. Kelompok Unsur Informasi Industri: Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten dan penyediaan informasi industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten. d. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, pengembangan industri dan informasi industri; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di

NO.	JABATAN/UNIT ORGANISASI	TUGAS	FUNGSI/URAIAN TUGAS
			bidang perindustrian, pengembangan industri dan informasi industri; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2. Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

Aset utama yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah Sumber Daya Manusia. Jumlah ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sampai dengan tahun 2025 sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang. Jika dilihat dari komposisi ASN berdasarkan golongan, 15,39% atau 6 orang memiliki golongan II, 64,10% atau 25 orang memiliki golongan III dan 20,51% atau 8 orang memiliki golongan IV.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri diklasifikasikan ke dalam Tabel 2.1 dan Tabel 2.2. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	0	0	0	0	0
2	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
3	SMA Sederajat	1	0	10	0	11
4	D3	3	2	0	0	5
5	S1	15	10	6	3	34
6	S2	3	5	0	0	8
7	S3	0	0	0	0	0
Total		22	17	16	3	58

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Dari jumlah pegawai sebanyak 58 orang ini kemudian ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat

golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri 2025

NO.	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	4	2	6
2	Golongan III	15	10	25
3	Golongan IV	3	5	8
Total		22	17	39

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4 Aset Tanah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.055	1993	Jl. Pemuda I No. 5, Kec. Wonogiri, Kel. Giripurwo - 57612	Hak Pakai	19/01/1994	HP.71	Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri	APBD Pemda	250.000.000	
2	Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	33.918	1984	Jl. Ngadirojo, Ngreco, Ngadirojo Kidul, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri - 57681	Hak Pakai	01/12/2020	HP.17	Komplek Gedung UPTD Balai Latihan Kerja	APBN	82.066.000	

Tabel 2.5 Gedung dan Bangunan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri

o.	Nama Barang/Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Lain-Lain	B	612	Kel Pundusari, Kec. Manyaran	612	Hak Pakai	APBD	3.022.192.000	Gedung Rancak Bangunan Manyaran
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	650	Jln. Pemuda I No. 5, Kel. Giripurwo, Kec. Wonogiri	650	Hak Pakai	APBD	909.106.240	Gedung Induk Dinas tenaga Kerja dan Perindustrian
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KB	200	Jln. Raya Ngadirojo KM 7, Ds. Ngadirojo Kidul, Kec. Ngadirojo	200	Hak Pakai	APBN	22.000.000	Ruang Kepala-Ruang TU, Ruang Komputer, Ruang Bendahara, Ruang PPL, Ruang Tata Niaga Balai Latihan Kerja
4	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	KB	50	Jln. Raya Ngadirojo KM 7, Ds. Ngadirojo Kidul, Kec. Ngadirojo	50	Hak Pakai	APBN	147.300.000	Pagar dan Talud

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga (Rp)	Keterangan
5	Bangunan Bengkel/ Hanggar Permanen	B	358	Jln. Raya Ngadirojo KM 7, Ds. Ngadirojo Kidul, Kec. Ngadirojo	358	Hak Pakai	APBN	49.892.500	Bengkel B
6	Bangunan Bengkel/ Hanggar Permanen	B	358	Jln. Raya Ngadirojo KM 7, Ds. Ngadirojo Kidul, Kec. Ngadirojo	358	Hak Pakai	APBN	33.500.000	Bengkel C
7	Bangunan Bengkel/ Hanggar Permanen	B	358	Jln. Raya Ngadirojo KM 7, Ds. Ngadirojo Kidul, Kec. Ngadirojo	358	Hak Pakai	APBN	49.892.500	Bengkel A
8	Bangunan Bengkel/ Hanggar Permanen	B	450	Jln. Raya Ngadirojo KM 7, Ds. Ngadirojo Kidul, Kec. Ngadirojo	450	Hak Pakai	APBN	692.504.500	Bengkel D
9	Bangunan Bengkel/ Hanggar Permanen	B	450	Jln. Raya Ngadirojo KM 7, Ds. Ngadirojo Kidul, Kec. Ngadirojo	450	Hak Pakai	APBN	712.661.700	Bengkel E
10	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Lain-Lain	B	88	Jln. Raya Ngadirojo KM 7, Ds. Ngadirojo Kidul, Kec. Ngadirojo	88	Hak Pakai	APBN	6.500.000	Musholla
11	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	B	160	Jln. Raya Ngadirojo KM 7, Ds. Ngadirojo Kidul, Kec. Ngadirojo	160	Hak Pakai	APBN	13.000.000	Ruang Teori
12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Lain-Lain	KB	60	Jln. Raya Ngadirojo KM 7, Ds. Ngadirojo Kidul, Kec. Ngadirojo	60	Hak Pakai	APBN	6.000.000	Kantin
13	Gedung Garasi/Pool Permanen	B	42	Jln. Raya Ngadirojo KM 7, Ds. Ngadirojo Kidul, Kec. Ngadirojo	42	Hak Pakai	APBN	5.000.000	Garasi
14	Rumah Negara Golongan III Lain-Lain	KB	70	Jln. Raya Ngadirojo KM 7, Ds. Ngadirojo Kidul, Kec. Ngadirojo	70	Hak Pakai	APBN	41.842.000	Rumah Dinas C1

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga (Rp)	Keterangan
15	Rumah Negara Golongan III Lain-Lain	KB	50	Jln. Raya Ngadirojo KM 7, Ds. Ngadirojo Kidul, Kec. Ngadirojo	50	Hak Pakai	APBN	5.683.000	Rumah Dinas D1
16	Rumah Negara Golongan III Lain-Lain	KB	50	Jln. Raya Ngadirojo KM 7, Ds. Ngadirojo Kidul, Kec. Ngadirojo	50	Hak Pakai	APBN	5.683.000	Rumah Dinas D2
17	Rumah Negara Golongan III Lain-Lain	KB	50	Jln. Raya Ngadirojo KM 7, Ds. Ngadirojo Kidul, Kec. Ngadirojo	50	Hak Pakai	APBN	5.683.000	Rumah Dinas D3
18	Rumah Negara Golongan III Lain-Lain	KB	50	Jln. Raya Ngadirojo KM 7, Ds. Ngadirojo Kidul, Kec. Ngadirojo	50	Hak Pakai	APBN	5.683.000	Rumah Dinas D4
19	Rumah Negara Golongan III Lain-Lain	KB	50	Jln. Raya Ngadirojo KM 7, Ds. Ngadirojo Kidul, Kec. Ngadirojo	50	Hak Pakai	APBN	5.683.000	Rumah Dinas D5
20	Rumah Negara Golongan III Lain-Lain	KB	50	Jln. Raya Ngadirojo KM 7, Ds. Ngadirojo Kidul, Kec. Ngadirojo	50	Hak Pakai	APBN	5.683.000	Rumah Dinas D6
21	Rumah Negara Golongan III Lain-Lain	KB	36	Jln. Raya Ngadirojo KM 7, Ds. Ngadirojo Kidul, Kec. Ngadirojo	36	Hak Pakai	APBN	5.683.000	Rumah Dinas E2
22	Aula Permanen	KB	176	Jln. Raya Ngadirojo KM 7, Ds. Ngadirojo Kidul, Kec. Ngadirojo	176	Hak Pakai	APBN	30.000.000	Ruang Asrama
23	Pagar Permanen	KB	50	Jln. Raya Ngadirojo KM 7, Ds. Ngadirojo Kidul, Kec. Ngadirojo	50	Hak Pakai	APBN	114.905.000	Pagar dan Talud

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.

a. Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri

Tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan ketenagakerjaan dan perindustrian yang disajikan pada Tabel 2.5 dan dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Renstra 2021-2026

Tujuan OPD Non Urusan:

- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- Indikator:
- **Nilai Kematangan Organisasi**
- Perkembangan capaian Nilai Kematangan Organisasi digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Grafik Nilai Kematangan Organisasi Disnakerin Kab. Wonogiri

Nilai Kematangan Organisasi selama tahun Renstra 2021-2026 mengalami penurunan karena terdapat kesalahan teknis oleh Bagian Organisasi yang memverifikasi variabel penilaian dengan data dukung yang belum, sedangkan variabel yang seharusnya

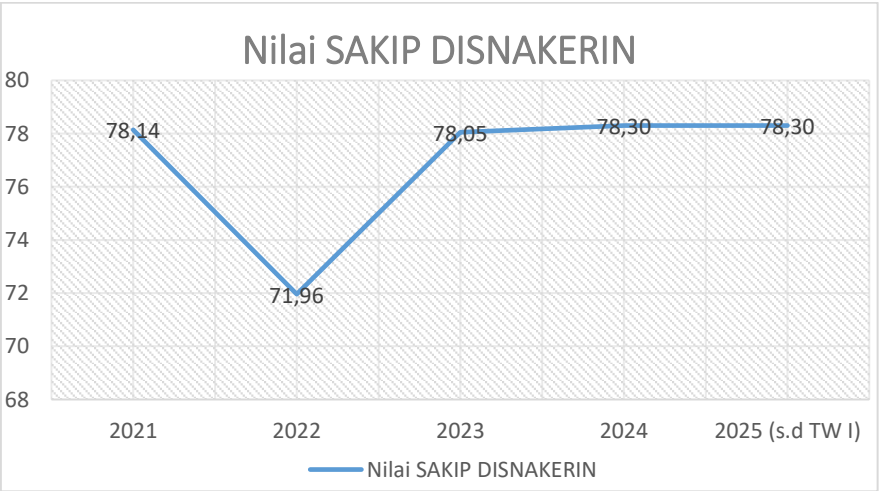
dikirim merupakan variabel yang telah lengkap data dukungannya. Sedangkan Nilai Kematangan Organisasi untuk tahun 2025 belum rilis karena masih berada di tahun berjalan.

Sasaran OPD Non Urusan:

- Meningkatnya Kinerja DISNAKERIN

Indikator:

a. Nilai SAKIP DISNAKERIN



Gambar 2.3 Grafik Nilai SAKIP Disnakerin Kab. Wonogiri

Nilai SAKIP DISNAKERIN pada tahun Renstra 2021-2026 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 dengan nilai 78,14 dan di tahun 2022 menurun tajam menjadi 71,96. Hal ini dikarenakan adanya perubahan indikator penilaian AKIP. Sedangkan di tahun 2023 mengalami kenaikan signifikan dari 71,96 menjadi 78,05. Dan di tahun 2024 kembali mengalami peningkatan menjadi 78,30. Perolehan Nilai SAKIP ini merupakan hasil dari peran serta dan kerjasama seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dan menunjukkan kinerja tata kelola yang efektif.

b. Indeks Profesionalitas ASN DISNAKERIN



Gambar 2.4 Grafik Indeks Profesionalitas ASN Disnakerin Kab. Wonogiri

Indeks Profesionalitas ASN di tahun 2021 sebesar 67,23 dan sedikit mengalami peningkatan di tahun 2022 sebesar 67,33. Di tahun 2023 mengalami kenaikan signifikan di angka 71,25 dan di tahun 2024 juga mengalami kenaikan signifikan di angka 80,15 hingga Triwulan I 2025. Hal ini menggambarkan bahwa ASN di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri memiliki peningkatan kompetensi yang baik dan untuk dipertahankan.

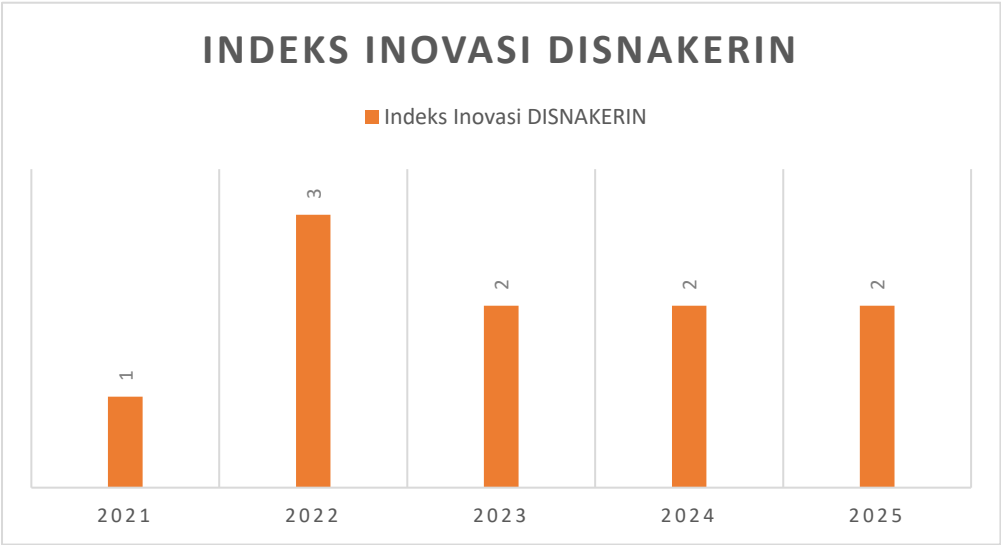
c. Jumlah ASN DISNAKERIN yang menjadi Agen Perubahan



Gambar 2.5 Grafik Jumlah ASN Disnakerin yang Menjadi Agen Perubahan

Jumlah ASN DISNAKERIN yang menjadi Agen Perubahan pada tahun Renstra 2021-2026 mengalami peningkatan. Di tahun 2021 terdapat 1 Agen Perubahan yakni Pimpinan OPD/Kepala Dinas. Tahun 2022 terdapat penambahan 2 orang sehingga jumlah di tahun 2022 menjadi 3 orang yang menjadi Agen Perubahan, yakni Kepala UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) dan Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (P3TKT). Dan di tahun 2024 seiring dengan penambahan urusan baru yakni Perindustrian, Agen Perubahan yang ditunjuk bertambah 1 orang yakni Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda, sehingga di tahun 2024 hingga Triwulan I 2025 menjadi 4 ASN yang ditunjuk sebagai Agen Perubahan DISNAKERIN. Agen Perubahan ini merupakan role model bagi pegawai lainnya agar tercipta ketaatan dan kedisiplinan dalam bekerja.

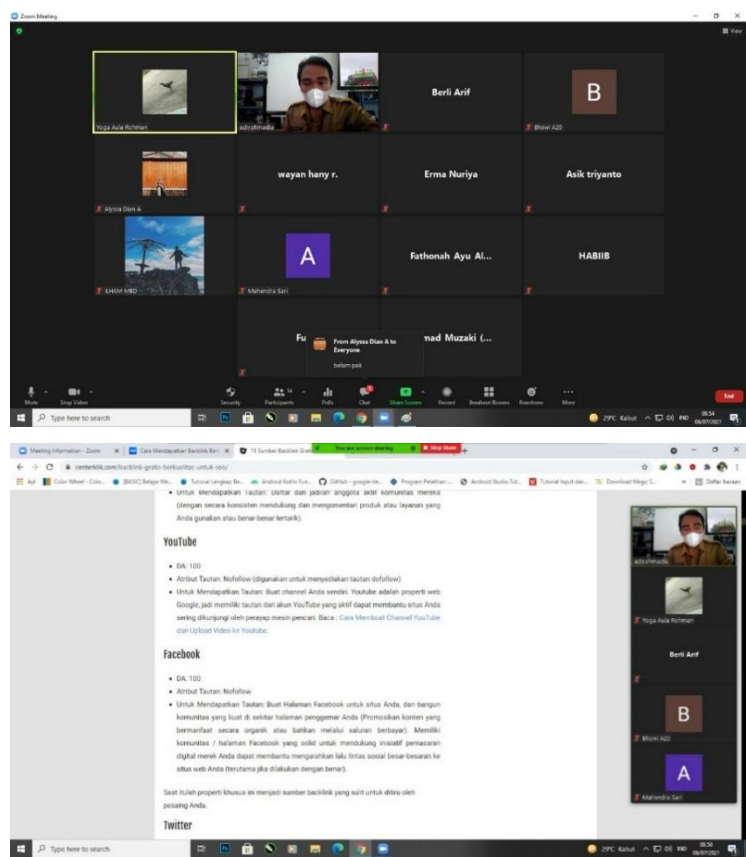
d. Indeks Inovasi DISNAKERIN



Gambar 2.6 Grafik Indeks Inovasi Dinsnakerin Kab. Wonogiri

Inovasi yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri sejak tahun 2021 mengalami fluktuasi, karena adanya penyesuaian dengan kondisi yang ada. Di tahun 2021 terdapat 1 inovasi yakni Jendela Kerja, namun di tahun 2022 lahir

2 inovasi baru yakni Super Gen Z yang dikembangkan oleh UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) dan *Work Readiness Programe* (WRP) yang dikembangkan oleh Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (P3TKT), sehingga di tahun 2022 terdapat 3 inovasi. Namun, karena Jendela Kerja tidak dapat digolongkan sebagai inovasi, maka Jendela Kerja tidak lagi digunakan sebagai inovasi OPD. Di tahun 2023 dan 2024 hingga Triwulan I 2025, inovasi yang dikembangkan yakni Super Gen Z yang ditujukan untuk menjawab kebutuhan pelatihan terkini khususnya bagi generasi Z dan *Work Readiness Programe* (WRP) yang dengan program pelatihan inovatif seperti fotografi, *coffeepreneur* dan *digital marketing*. Kedua inovasi telah terdaftar di *Wonogiri Innovation Award* (WIA) dan *Innovative Government Award* (IGA). Berikut dokumentasi dari inovasi yang telah dilaksanakan:



Gambar 2.7 Aktivitas Inovasi Super Gen Z berupa pelatihan yang dilaksanakan secara online



Gambar 2.8 Aktivitas Inovasi Super Gen Z berupa pelatihan yang dilaksanakan di SMK



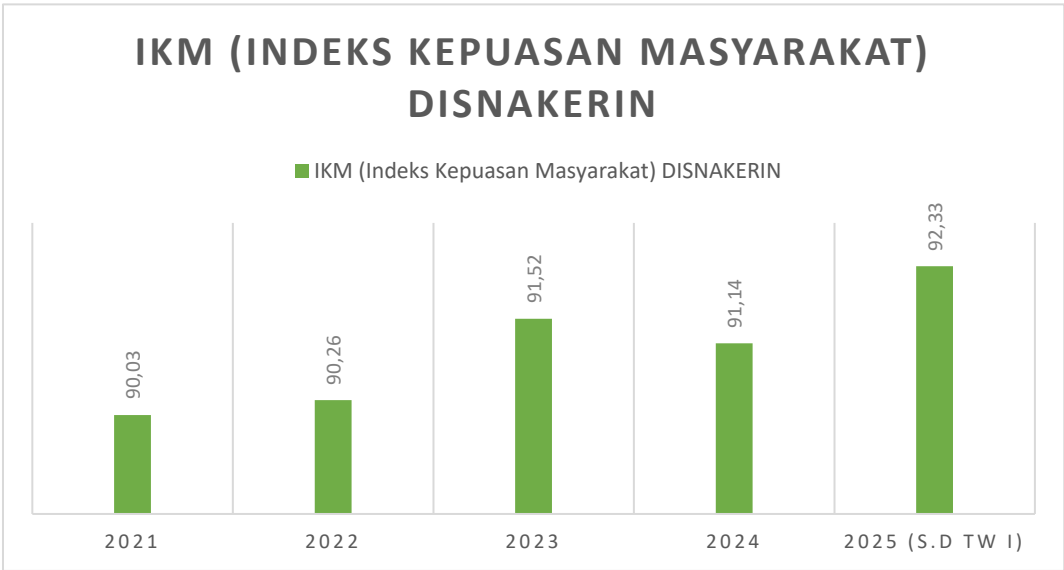
Gambar 2.9 Aktivitas Inovasi Super Gen Z berupa pelatihan *content creator* yang dilaksanakan di UPTD BLK





Gambar 2.10 Aktivitas Inovasi *Work Readiness Programe* (WRP) berupa pelatihan bagi tenaga pendidik

e. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) DISNAKERIN



Gambar 2.11 Grafik IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Disnakerin Kab. Wonogiri

Nilai target IKM yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026 memiliki kecenderungan tinggi. Di tahun 2021 memperoleh nilai IKM sebesar 90,03 dan di tahun 2022 mengalami kenaikan walaupun sedikit di angka 90,26. Pada tahun 2023 nilai IKM yang diperoleh sebesar 91,52 dan di tahun 2024 diperoleh IKM sebesar 91,14. Nilai IKM ini merupakan respon kepuasan dari masyarakat yang datang ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri untuk mendapatkan layanan ketenagakerjaan dan perindustrian.



Gambar 2.12 Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Disnakerin Kab. Wonogiri

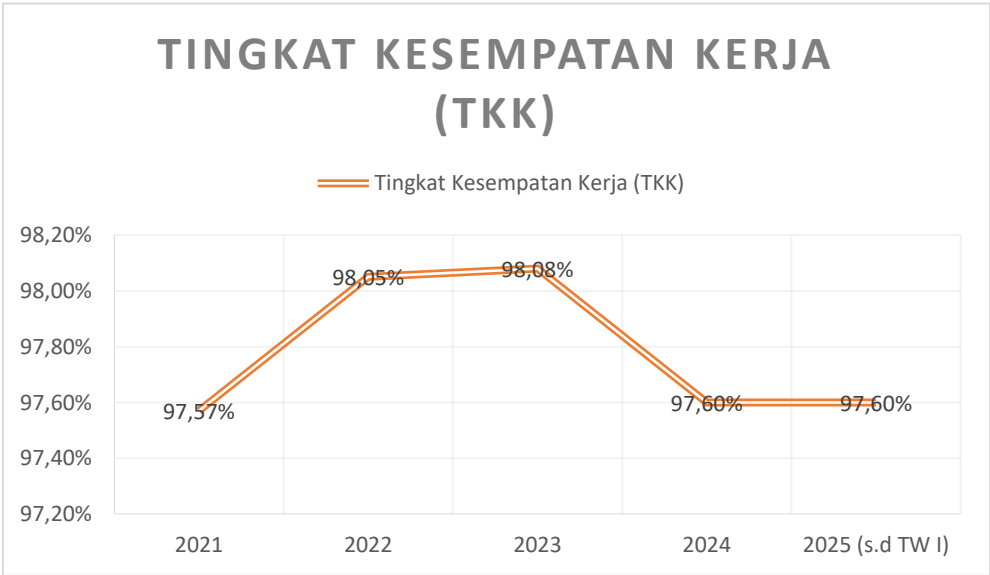
Tujuan OPD Urusan Ketenagakerjaan:

- Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja

Indikator:

- **Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)**

Perkembangan capaian angka TKK selama tahun Renstra 2021-2026 digambarkan dalam grafik sebagai berikut:



Gambar 2.13 Grafik Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kab. Wonogiri

Capaian kinerja untuk TKK selama tahun Renstra 2021-2026 tergolong baik karena telah mencapai di

atas target yang ditetapkan. Namun, dari tahun 2023 ke 2024 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena:

1. Pada tahun 2024, jumlah pengangguran di Wonogiri meningkat signifikan menjadi 16.195 orang, naik sekitar 2.400 orang dibandingkan 2023 yang tercatat 13.730 orang. Kenaikan ini menyebabkan persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja sehingga TTK turun.
2. Adanya PHK di perusahaan tekstil di wilayah Sukoharjo yang menyerap banyak tenaga kerja perempuan menjadi penyebab utama lonjakan pengangguran. Sebagian besar karyawan perusahaan tekstil tersebut adalah perempuan, sehingga pengangguran perempuan naik tajam dari 1,47% tahun 2023 menjadi 2,52% tahun 2024. Sektor transportasi juga mengalami penurunan, terlihat dari berkurangnya penumpang perempuan dari Wonogiri ke Sukoharjo.
3. Sektor pertanian yang masih menyerap tenaga kerja terbanyak menurun persentasenya, dari 46,86% pada 2022 menjadi 40,50% pada 2023. Sektor jasa juga turun mengalami penurunan walaupun sedikit, sementara sektor manufaktur justru naik dari 19,64% menjadi 26,98%. Pergeseran ini menunjukkan adanya ketidakstabilan sementara dalam penyerapan tenaga kerja akibat restrukturisasi sektor ekonomi.
4. Angkatan kerja di Kabupaten Wonogiri naik cukup banyak, dari 589.581 orang menjadi 713.252 orang, yang juga menambah tekanan pada penyediaan lapangan kerja sehingga TTK menurun.

Perhitungan TTK ini seiring dengan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Dengan formula sederhana = $100\% - \text{TPT}$. Secara keseluruhan, angka TTK Kabupaten Wonogiri tergolong baik hingga

Triwulan I 2025, dengan asumsi telah banyak masyarakat Kabupaten Wonogiri yang mendapatkan pekerjaan maupun menciptakan pekerjaan.

• **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Perkembangan capaian angka TPT selama tahun Renstra 2021-2026 digambarkan dalam grafik sebagai berikut:



Gambar 2.14 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Wonogiri

Angka TPT selama tahun Renstra 2021-2026 mengalami fluktuasi, namun masih tergolong kategori baik jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah. TPT Kabupaten Wonogiri mengalami penurunan dari yang sebelumnya tahun 2020 4,27% menjadi 2,43% pada tahun 2021. Angka TPT 2,43% ini menjadikan Kabupaten Wonogiri sebagai Kabupaten dengan capaian TPT terendah ke-1 se-Jawa Tengah.



Gambar 2.15 Piagam Penghargaan atas Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terendah ke-I Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah

Di tahun 2022, keadaan mengalami transisi dari kondisi pandemi menuju *new normal*, sehingga telah banyak perusahaan yang kembali membuka kesempatan bekerja dan menyerap tenaga kerja, angka TPT turun di angka 1,95% dan menjadikan kembali Kabupaten Wonogiri sebagai Kabupaten dengan capaian TPT terendah ke-2 se-Jawa Tengah setelah Kabupaten Rembang.

Di tahun 2023, dengan perkembangan program pelatihan dan layanan ketenagakerjaan yang semakin baik dan didukung oleh sektor-sektor lainnya, angka TPT di tahun 2023 kembali turun sebesar 1,92%. Namun, tidak dengan yang terjadi di tahun 2024. Di tahun 2024 hingga Triwulan I 2025, angka TPT mengalami kenaikan menjadi 2,40% yang disebabkan oleh dampak PHK perusahaan tekstil di Kabupaten Sukoharjo dan juga banyaknya calon tenaga kerja usia lulusan SMA/SMK (Generasi Z) yang terlalu memilah-milah pekerjaan.



Gambar 2.16 Piagam Penghargaan atas Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terendah ke-II Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah

Sasaran OPD Urusan Ketenagakerjaan:

- Menurunnya Pengangguran

Indikator:

a. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan



Gambar 2.17 Grafik Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan di Kab. Wonogiri

Kondisi pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan ini merupakan pencari kerja yang terdaftar dalam database Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Kabupaten Wonogiri dan telah dari jumlah yang terdaftar tersebut, mendapat penempatan di perusahaan/instansi yang dilamar. Di tahun 2021 terdapat sebesar 62,42% dari target 54,43%. Di tahun 2022 terdapat sebesar 76,71% dari target 55,16%. Di tahun 2023 terdapat 72,01% dari target 56,36%. Di tahun 2024 terdapat 78,72% dari target 57,20%, dan hingga Triwulan I 2025 mencapai sebesar 79,12%. Dari angka capaian ini dapat dikatakan bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Wonogiri telah mendapatkan pekerjaan. Faktor pendukung atas ketercapaian ini antara lain:

1. Pemanfaatan sistem informasi terpadu serta peningkatan jejaring kerja dengan dunia usaha dan industri menjadikan proses penempatan pencari kerja lebih efisien dan tepat sasaran. Dinas mendukung kemudahan pendaftaran dan pelaporan secara daring, serta memperkuat kerja sama dengan perusahaan penerima tenaga kerja.
2. OPD menaruh perhatian pada penguatan *link and match* antara lulusan pelatihan/vokasi dengan kebutuhan industri, termasuk kerja sama dengan BLK, SMK, maupun lembaga kursus lain. Hal ini meningkatkan kualitas dan keterampilan pencari kerja sehingga memperbesar peluang mereka untuk ditempatkan.
3. OPD menyelenggarakan Job Fair/bursa kerja, dan fasilitasi rekrutmen, termasuk program magang dalam dan luar negeri yang mendukung penyerapan pencari kerja yang telah terdaftar.

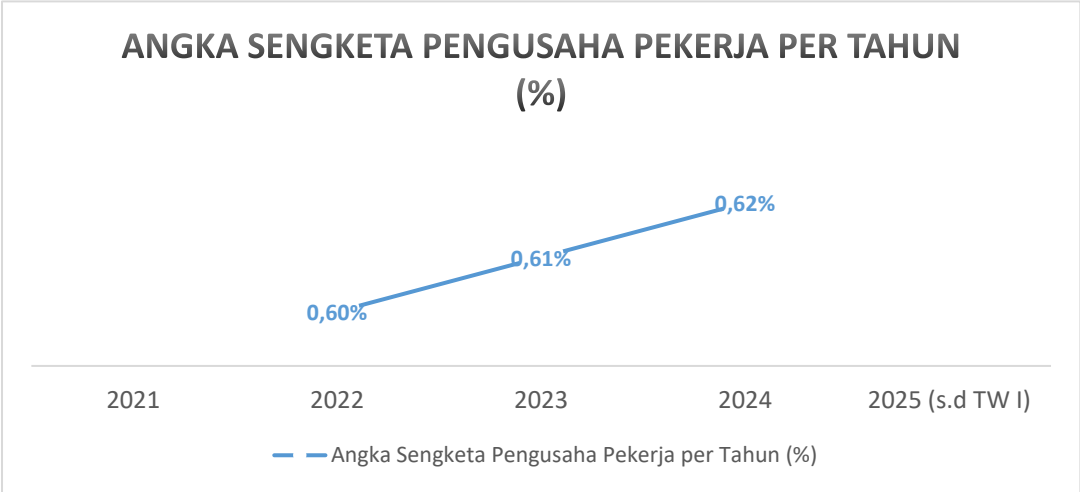
b. Besaran Kompetensi Calon Tenaga Kerja



Gambar 2.18 Grafik Besaran Kompetensi Calon Tenaga Kerja di Kab. Wonogiri

Kabupaten Wonogiri telah berusaha untuk menjawab tantangan ini dengan menyelenggarakan program-program pelatihan bagi calon tenaga kerja. Tahun 2021 karena terkendala kondisi pandemi Covid19, hanya memperoleh capaian sebesar 5,05% dari target 9,55%. Tahun 2022 memperoleh capaian 19,96% dari target 11,46%, karena pada tahun ini merupakan tahun transisi menuju *new normal*, sehingga mulai banyak masyarakat yang membutuhkan program pelatihan. Tahun 2023 kembali mengalami lonjakan yang signifikan, yakni sebesar 84,46% dari target 13,37%, karena Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk menyelenggarakan program pelatihan. Tahun 2024 sebesar 32,02% dari target 15,28% dan hingga Triwulan I 2025 mencapai sebesar 38,93%, artinya bahwa peran pemerintah dalam meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja telah bekerja dengan baik. Namun, kekurangan dari pengukuran ini yakni target yang ditetapkan masih berorientasi pada kondisi pandemi Covid19 (terlalu kecil), sehingga semakin ke depan, justru mengalami kenaikan atau pencapaian kinerja yang melebihi target.

c. Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun

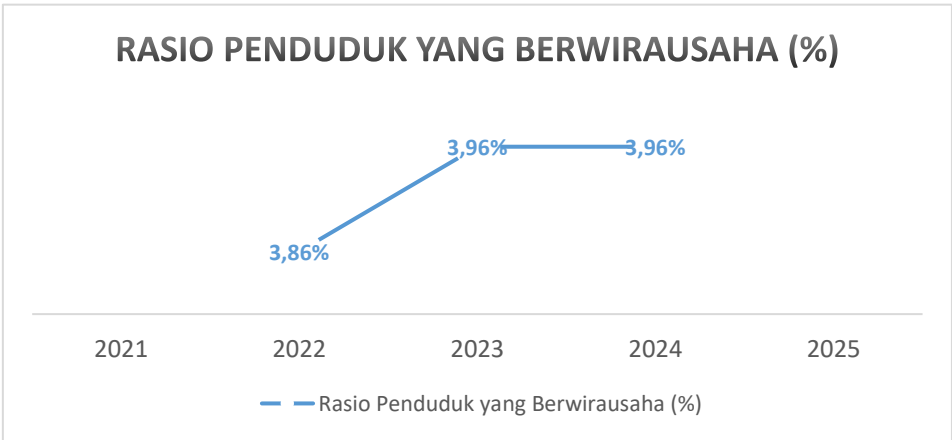


Gambar 2.19 Grafik Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun di Kab. Wonogiri

Angka sengketa pengusaha pekerja ini merupakan kondisi dimana adanya sengketa pengusaha dengan pekerja yang terjadi di setiap tahunnya. Tahun 2021 tidak terdapat laporan adanya sengketa, namun di tahun 2022 hingga 2024 terdapat 3 laporan sengketa pengusaha dengan pekerja dan ini telah terselesaikan dengan baik. Untuk capaian di Triwulan I 2025 belum terdapat laporan adanya sengketa. Jika capaian kinerja angka sengketa pengusaha pekerja ini semakin kecil, maka keadaan industrial semakin baik.

Tujuan OPD Urusan Perindustrian:

- Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat
- Indikator:
- Rasio Penduduk yang Berwirausaha



Gambar 2.20 Grafik Rasio Penduduk yang Berwirausaha di Kab. Wonogiri

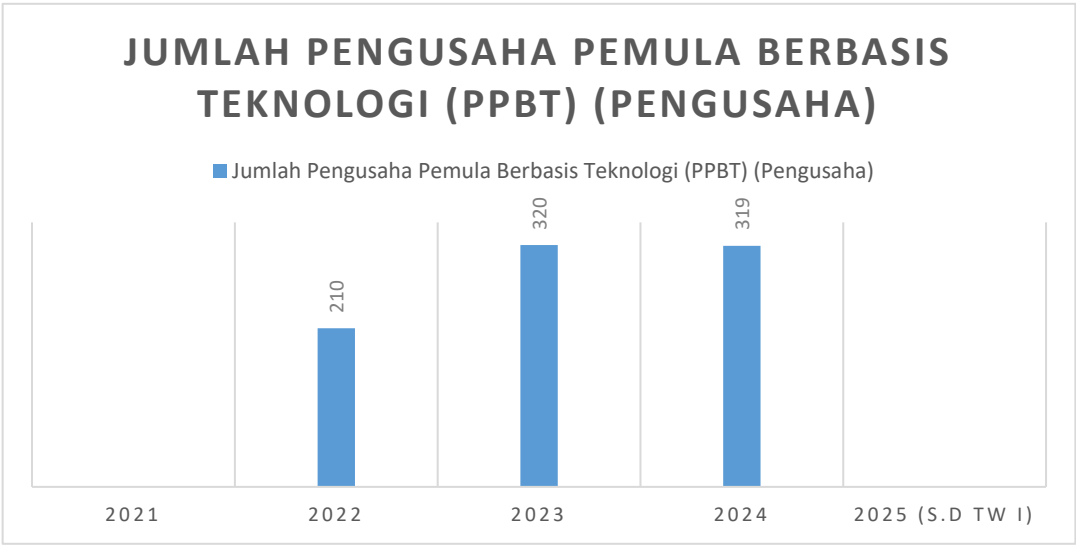
Rasio penduduk yang berwirausaha ini menunjukkan tingkat pertumbuhan masyarakat/pelaku usaha industri dari tahun ke tahun. Di tahun 2021 tidak terdapat angka yang pasti untuk disajikan dalam laporan karena masih dalam pandemi Covid19, namun di tahun 2021 memiliki target 3,65%. Di tahun 2022 terdapat angka capaian 3,86% dari target 3,75%, tergolong baik karena di masa *new normal*, masyarakat tetap berupaya untuk mendirikan usaha. Di tahun 2023 sebesar 3,96% dari target 3,85% dan di tahun 2024 sebesar 3,96% dari target 3,95%. Dan di Triwulan I 2025, belum dapat dihitung karena perhitungan rasio penduduk yang berwirausaha dilaksanakan di akhir tahun. Capaian kinerja ini tergolong capaian yang baik.

Sasaran OPD Urusan Perindustrian:

- Masyarakat yang Mandiri Ekonominya

Indikator:

- **Jumlah Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)**



Gambar 2.21 Grafik Jumlah Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) di Kab. Wonogiri

Keberadaan Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) dapat mendorong pertumbuhan industri di Kabupaten Wonogiri. Selama tahun Renstra 2021-2026 telah mengalami kenaikan. Namun, di tahun 2021

jumlah PPBT belum teridentifikasi karena data belum tersedia. Di tahun 2022, terdapat PPBT sebanyak 210 pengusaha. Di tahun 2023 meningkat 110 PPBT menjadi 320 pengusaha. Dan di tahun 2024, jumlah PPBT masih dapat dipertahankan di angka 319 pengusaha, sedangkan untuk tahun 2025 masih dalam proses pendampingan PPBT.

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Wonogiri sebelum dan sesudah mengalami perubahan nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dijelaskan dalam dua tabel berikut.

**Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2023 (sebelum perubahan nomenklatur SOTK PD)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-				Realisasi Capaian pada Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Nilai Kematangan Organisasi	Index			n/a	44	44	45	n/a	42	40	40	n/a	95,45%	90,91%	88,89%
2	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja Kab. Wonogiri	Index			n/a	75,17	75,20	75,50	n/a	78,14	71,96	78,05	n/a	103,95%	95,69%	103,37%
3	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Tenaga Kerja Kab. Wonogiri	Angka			n/a	60	65	70	n/a	67,23	67,33	71,25	n/a	112,05%	103,60%	101,79%
4	Jumlah ASN Dinas Tenaga Kerja Kab. Wonogiri yang menjadi Agen Perubahan	Orang			n/a	1	1	2	n/a	1	3	4	n/a	100%	300%	200%
5	Indeks Inovasi Dinas Tenaga Kerja Kab. Wonogiri	Angka			n/a	1	1	1	n/a	1	3	2	n/a	100%	300%	200%
6	IKM Dinas Tenaga Kerja Kab. Wonogiri	Angka			90	90	90	91	90	90,03	90,26	91,52	100%	100,03%	100,29%	100,57%
7	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%			n/a	95,73	95,90	96,15	95,73	97,57	98,05	98,07	n/a	101,92%	102,24%	102%
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%			3,77	4,27	4,10	3,85	4,27	2,43	1,95	1,92	76,58%	143,09%	152,43%	150,13%
9	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%			9	54,43	55,16	56,36	50,44	62,42	76,71	72,01	560,44%	114,68%	139,07%	127,77%
10	Besaran Kompetensi Calon Tenaga Kerja	%			n/a	9,55	11,46	13,37	n/a	5,05	19,96	84,46	n/a	52,88%	174,17%	631,71%
11	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun	%			n/a	2,37	2,21	2,05	n/a	n/a	0,6	0,61	n/a	n/a	172,85%	170,24%
12	Persentase Calon Wirausaha Baru Yang Mandiri Dari Jumlah Data Pengangguran	%			0,78	n/a	n/a	n/a	0,58	n/a	n/a	n/a	74,36%	n/a	n/a	n/a
13	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	%			100	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a
14	Persentase Pekerja/ Buruh Yang Menjadi Peserta Jamsostek	%			56,51	n/a	n/a	n/a	68,07	n/a	n/a	n/a	120,46%	n/a	n/a	n/a
15	Persentase Peningkatan Kesejahteraan Transmigran	%			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	61,54	70,00	n/a	n/a	n/a	n/a

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-				Realisasi Capaian pada Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	Sesuai/ Tidak Sesuai			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	sesuai	sesuai	sesuai	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	%			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	0	12,05	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Perusahaan			n/a	5	5	5	n/a	5	5	5	n/a	100%	100%	100%
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%			n/a	1,21	1,24	1,27	n/a	n/a	6,16	2,03	n/a	n/a	496,77%	159,84%
1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	%			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	82,50	62,26	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	%			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	97,62	94,50	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	%			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2,57	1,20	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Persentase LPK yang terakreditasi	%			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	19,35	15,00	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	%			n/a	100	100	100	n/a	100	100	100	n/a	100%	100%	100%
6	Jumlah penganggur yang dilatih	Orang			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3.268	9.090	n/a	n/a	n/a	n/a
7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	56,86	n/a	n/a	n/a	n/a
8	Persentase penyerapan lulusan	%			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	44,52	44,08	n/a	n/a	n/a	n/a
9	Lulusan bersertifikat kompetensi	%			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	65,24	56,86	n/a	n/a	n/a	n/a
10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	Orang			n/a	5	5	5	n/a	n/a	40	60	n/a	n/a	800%	1.200%
11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Orang			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	40	60	n/a	n/a	n/a	n/a
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	juta rupiah/tenaga kerja			39,01	40,37	n/a	n/a	36,86	36,78	38,83	32,65	94,48%	94,28%	n/a	n/a

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-				Realisasi Capaian pada Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	%			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1,81	2,21	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Data tingkat produktivitas total	%			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%			n/a	10	10	11	n/a	10	53,01	16,33	n/a	100%	530,1%	148,45%
1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	%			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	15,46	17,76	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	%			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	SP/SB			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	15 SP/PB	16 SP/PB	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	%			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	91,21	92,16	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	%			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	52,41	54,49	n/a	n/a	n/a	n/a
6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	%			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0,60	0,61	n/a	n/a	n/a	n/a
7	Jumlah mogok kerja	Aksi			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a
8	Jumlah penutupan perusahaan	Aksi			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	0	n/a	n/a	n/a	n/a
9	Jumlah perselisihan kepentingan	Per selisihan			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a
10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Per selisihan			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-				Realisasi Capaian pada Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	Jumlah perselisihan PHK	Per selisihan			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a
12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Pekerja/Buruh			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a
13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Perkara			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	0	n/a	n/a	n/a	n/a
14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Ada/Tidak Ada			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Ada	Ada	n/a	n/a	n/a	n/a
15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	%			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	33,30	0	n/a	n/a	n/a	n/a
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%			9,00	54,43	55,16	56,36	50,44	62,42	76,71	72,01	560,44%	114,68%	139,07%	127,77%
1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Lowongan Kerja			n/a	5.000	6.000	7.000	n/a	25.388	27.645	14.290	n/a	507,76%	460,75%	204,14%
2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	Orang			n/a	7.250	7.250	7.250	n/a	12.276	12.385	10.413	n/a	169,32%	170,82%	143,62%
3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	BKK			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	46	46	46	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	Orang			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	86	92	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Orang			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	6	6	n/a	n/a	n/a	n/a
6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	Ada/Tidak Ada			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	n/a	n/a	n/a	n/a

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-				Realisasi Capaian pada Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	PK			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	366	0	n/a	n/a	n/a	n/a
8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Orang			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	16	0	n/a	n/a	n/a	n/a
9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Orang			n/a	5	5	5	n/a	0	40	60	n/a	n/a	800%	1.200%
10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Orang			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	336	88	n/a	n/a	n/a	n/a
11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	Orang			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	73	0	n/a	n/a	n/a	n/a
12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Orang			n/a	5	5	5	n/a	0	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a
13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Ada/ Tidak Ada			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	n/a	n/a	n/a	n/a
14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	Ada/ Tidak Ada			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: LKjIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri

**Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 (setelah perubahan nomenklatur SOTK PD)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-	Realisasi Capaian pada Tahun ke-	Rasio Capaian pada Tahun ke-
					2024	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai Kematangan Organisasi	Index			45	37	82,22%
2	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Wonogiri	Index			76,50	78,30	102,35%
3	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Wonogiri	Angka			75	80,15	106,87%
4	Jumlah ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Wonogiri yang menjadi Agen Perubahan	Orang			3	4	133,33%
5	Indeks Inovasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Wonogiri	Angka			1	2	200%
6	IKM Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Wonogiri	Angka			91	91,14	101,03%
7	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%			96,40	97,60	101,24%
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%			3,60	2,40	133,33%
9	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%			57,20	78,72	137,62%
10	Besaran Kompetensi Calon Tenaga Kerja	%			15,28	32,02	209,55%
11	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun	%			1,89	0,62	167,19%
12	Rasio Penduduk yang Berwirausaha	%			3,95	3,96	100,25%
13	Jumlah Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)	Peng usaha			300	319	106,33%
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%			n/a	77,78	n/a
1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	Sesuai/ Tidak Sesuai			n/a	sesuai	n/a
2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	%			n/a	11,53	n/a
3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Perusahaan			5	5	100%
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%			1,80	1,80	100%
1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	%			n/a	100	n/a

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-	Realisasi Capaian pada Tahun ke-	Rasio Capaian pada Tahun ke-
					2024	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	%			n/a	100%	n/a
3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	%			n/a	4,41	n/a
4	Persentase LPK yang terakreditasi	%			n/a	16,67	n/a
5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	%			100	100	100%
6	Jumlah penganggur yang dilatih	Orang			n/a	3.093	n/a
7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%			n/a	100	n/a
8	Persentase penyerapan lulusan	%			n/a	100	n/a
9	Lulusan bersertifikat kompetensi	%			n/a	52,63	n/a
10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	Orang			5	15	300%
11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Orang			n/a	15	n/a
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	juta rupiah/tenaga kerja			n/a	35,67	n/a
1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	%			n/a	2,70	n/a
2	Data tingkat produktivitas total	%			n/a	n/a	n/a
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%			12	18,50	154,16%
1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	%			n/a	19,33	n/a
2	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	%			n/a	100	n/a
3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	SP/SB			n/a	16 SP/PB	n/a
4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	%			n/a	92,59	n/a
5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	%			n/a	55,93	n/a
6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	%			n/a	0,62	n/a
7	Jumlah mogok kerja	Aksi			n/a	0	n/a
8	Jumlah penutupan perusahaan	Aksi			n/a	1	n/a

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-	Realisasi Capaian pada Tahun ke-	Rasio Capaian pada Tahun ke-
					2024	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Jumlah perselisihan kepentingan	Perselisihan			n/a	0	n/a
10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Perselisihan			n/a	0	n/a
11	Jumlah perselisihan PHK	Perselisihan			n/a	0	n/a
12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Pekerja/Buruh			n/a	106	n/a
13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Perkara			n/a	0	n/a
14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Ada/Tidak Ada			n/a	Ada	n/a
15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	%			n/a	0	n/a
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%			57,20	78,72	137,62%
1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Lowongan Kerja			8.000	17.958	224,47%
2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	Orang			7.250	9.657	133,20%
3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	BKK			n/a	46	n/a
4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	Orang			n/a	84	n/a
5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Orang			n/a	6	n/a
6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	Ada/Tidak Ada			n/a	Tidak ada	n/a
7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	PK			n/a	0	n/a
8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Orang			n/a	0	n/a
9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Orang			5	15	300%
10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Orang			n/a	93	n/a

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-	Realisasi Capaian pada Tahun ke-	Rasio Capaian pada Tahun ke-
					2024	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	Orang			n/a	0	n/a
12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Orang			5	0	n/a
13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Ada/ Tidak Ada			n/a	Tidak ada	n/a
14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	Ada/ Tidak Ada			n/a	Tidak ada	n/a
	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%			4	4,50	112,5%
1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	%			n/a	n/a	n/a
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%			n/a	100	n/a
1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	%			100	100	100%
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%			45	44,44	98,75%
1	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	%			22	66,67	303,04%
2	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	%			n/a	Nihil	n/a
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%			n/a	Nihil	n/a
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten/Kota	%			n/a	Nihil	n/a
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Indeks			100	100	100%
	TRANSMIGRASI				n/a	n/a	n/a

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-	Realisasi Capaian pada Tahun ke-	Rasio Capaian pada Tahun ke-
					2024	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	n/a			n/a	n/a	n/a
2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	n/a			n/a	n/a	n/a
3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	n/a			n/a	n/a	n/a

Sumber: LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri

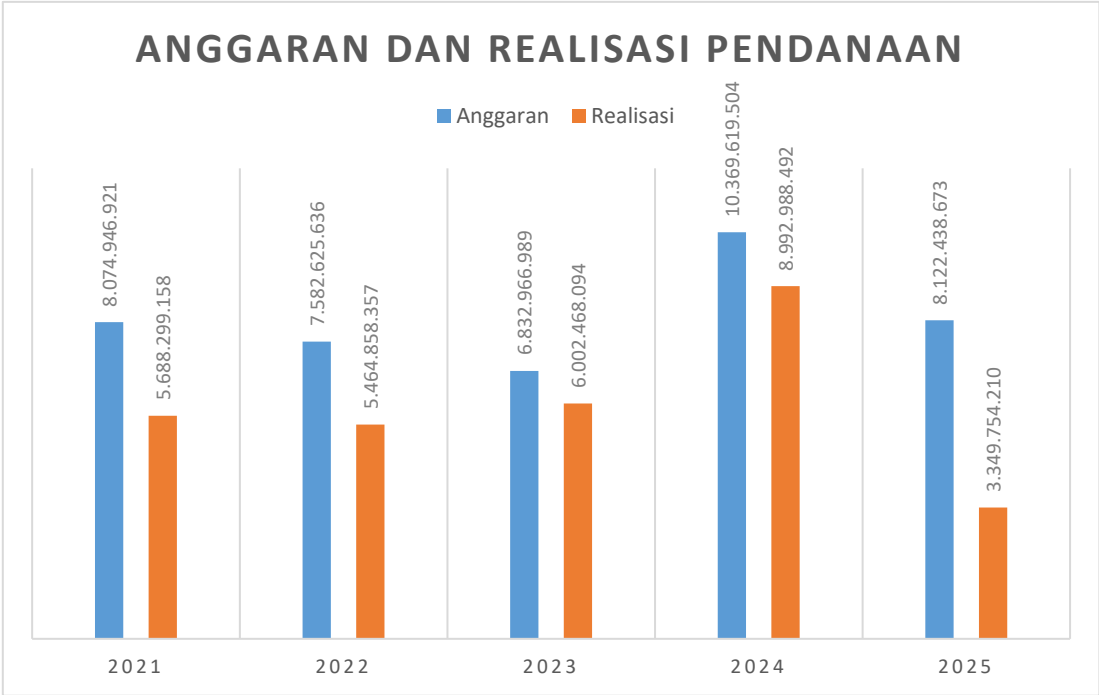
Keterangan:

1	Nomor	11	Realisasi tahun pertama renstra disusun
2	Indikator kinerja yang ada di renstra sebelumnya (level tujuan, sasaran, program)	12	Realisasi tahun kedua renstra disusun
3	Satuan kinerja	13	Realisasi tahun ketiga renstra disusun
4	Jika ada target IKK bisa dimasukkan, jika tidak ada bisa dikosongkan	14	Realisasi tahun keempat renstra disusun
5	Target dari kementerian terkait misalnya	15	Realisasi tahun kelima renstra disusun
6	Target awal atau tahun pertama renstra disusun	16	Rasio tahun pertama renstra disusun
7	Target tahun kedua renstra disusun	17	Rasio tahun kedua renstra disusun
8	Target tahun ketiga renstra disusun	18	Rasio tahun ketiga renstra disusun
9	Target tahun keempat renstra disusun	19	Rasio tahun keempat renstra disusun
10	Target tahun kelima renstra disusun	20	Rasio tahun kelima renstra disusun

Rumus Rasio: $\frac{Realisasi\ Tahun\ N}{Target\ Tahun\ N} \times 100\%$

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri

Anggaran dan Realisasi Program yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri selama tahun 2021 hingga 2025 (Triwulan II) disajikan dalam grafik berikut.



Gambar 2.22 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Disnakerin Kab. Wonogiri

Anggaran dan realisasi yang disajikan dalam grafik di atas menggambarkan bahwa perbandingan antara anggaran dan realisasi pendanaan dari tahun 2021 hingga 2025 (Triwulan II). Setiap tahun, nilai realisasi selalu lebih rendah dibandingkan anggaran yang telah ditetapkan.

- a. Pagu Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 sebesar Rp 8.074.946.921 dengan realisasi sebesar Rp 5.688.299.158 atau penyerapan anggaran sebesar 70,44%.
- b. Pagu Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 sebesar Rp 7.582.625.636 dengan realisasi sebesar Rp 5.464.858.357 atau penyerapan anggaran sebesar 72,07%.
- c. Pagu Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 sebesar Rp 6.832.966.989 dengan realisasi

- sebesar Rp 6.002.468.094 atau penyerapan anggaran sebesar 87,84%.
- d. Pagu Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 sebesar Rp 10.369.619.504 dengan realisasi sebesar Rp 8.992.988.492 atau penyerapan anggaran sebesar 86,72%.
- e. Pagu Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 sebesar Rp 8.303.127.791 dengan realisasi hingga Triwulan II sebesar Rp 3.349.754.210 atau penyerapan anggaran sebesar 40,34%.

Secara umum, grafik ini menggambarkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi pada besaran anggaran di setiap tahunnya, realisasi pendanaan selalu berada di bawah anggaran yang direncanakan. Selama tahun 2021 hingga 2023, masih mengampu 1 urusan yakni Ketenagakerjaan, sedangkan di tahun 2024 hingga 2025 mengampu 2 urusan yakni Ketenagakerjaan dan Perindustrian.

Berikut disajikan tabel kondisi anggaran dan realisasi anggaran perangkat daerah tahun 2020, 2021-2023 dan 2024.

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-	Realisasi Anggaran pada Tahun ke-	Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-	Rata-rata Pertumbuhan	
	I	I	I	Anggaran	Realisasi
	2020	2020	2020		
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	530.120.000	477.388.197	90,05%	90,05%	90,05%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.998.000	99,90%	99,90%	99,90%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	125.000.000	104.514.673	83,61%	83,61%	83,61%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan	15.000.000	10.701.000	71,34%	71,34%	71,34%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-	Realisasi Anggaran pada Tahun ke-	Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-	Rata-rata Pertumbuhan	
	I	I	I	Anggaran	Realisasi
	2020	2020	2020		
Kendaraan Dinas/ Operasional					
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.000.000	5.000.000	100%	100%	100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.000.000	30.000.000	100%	100%	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	9.995.500	99,95%	99,95%	99,95%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.999.250	99,98%	99,98%	99,98%
Penyediaan Makanan dan Minuman	5.000.000	5.000.000	100%	100%	100%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	45.000.000	44.999.774	99,99%	99,99%	99,99%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	8.000.000	8.000.000	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	280.120.000	252.180.000	90,02%	90,02%	90,02%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100.000.000	97.749.252	97,75%	97,75%	97,75%
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	45.000.000	44.989.252	99,97%	99,97%	99,97%
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	10.000.000	10.000.000	100%	100%	100%
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	10.000.000	10.000.000	100%	100%	100%
Perbaikan Instalasi dan Penambahan Jaringan	5.000.000	5.000.000	100%	100%	100%
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	20.000.000	19.750.000	98,75%	98,75%	98,75%
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	10.000.000	10.000.000	100%	100%	100%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0	0	0	0	0
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	17.365.000	17.365.000	100%	100%	100%
Penyusunan Profil Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0
Gerakan Produktivitas Tenaga Kerja	0	0	0	0	0
Fasilitasi Pemagangan Tenaga Kerja (Magang Jepang)	17.365.000	17.365.000	100%	100%	100%
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pelatihan Kerja	0	0	0	0	0
Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK)	0	0	0	0	0
PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	34.802.000	34.802.000	100%	100%	100%
Pengelolaan IPK, Job Fair, Pembinaan Bursa	29.322.000	29.322.000	100%	100%	100%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-	Realisasi Anggaran pada Tahun ke-	Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-	Rata-rata Pertumbuhan	
	I	I	I	Anggaran	Realisasi
	2020	2020	2020		
Kerja Khusus (BKK) dan Forum HRD					
Penempatan Tenaga Kerja melalui Pembentukan Kelompok Usaha Produktif/ Mandiri	0	0	0	0	0
Surveilence ISO	0	0	0	0	0
Inovasi Pelayanan Publik Bidang Ketenagakerjaan dengan BLK Satelit	5.480.000	5.480.000	100%	100%	100%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	20.778.000	20.755.500	99,89%	99,89%	99,89%
Pembinaan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Secara Biparti	6.778.000	6.778.000	100%	100%	100%
Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan dan Monitoring Hubungan Industrial	0	0	0	0	0
Pembinaan Jaminan Sosial bagi Pekerja	0	0	0	0	0
Pemantauan, Sosialisasi UMK dan Pembinaan Penyusunan Struktur Skala Upah	14.000.000	13.977.500	99,83%	99,83%	99,83%
PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL	0	0	0	0	0
Identifikasi Calon Lokasi dan Penyuluhan Transmigrasi	0	0	0	0	0
Penempatan, Monev, dan Penanganan Transmigrasi	0	0	0	0	0

**Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2023 (sebelum perubahan nomenklatur SOTK PD)**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-			Rata-Rata Pertumbuhan	
	I 2021	II 2022	III 2023	I 2021	II 2022	III 2023	I 2021	II 2022	III 2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	7	8	9	12	13	14	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.768.011.309	7.025.622.042	6.089.362.525	5.394.844.891	4.914.181.207	5.271.412.458	69,45%	69,94%	86,57%	-0,11%	0,07%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.998.666	0	19.999.750	14.978.550	0	19.202.500	99,87%	0	96,01%	0%	0%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.998.666	0	19.999.750	14.978.550	0	19.202.500	99,87%	0	96,01%	0%	0%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.080.766.374	6.496.640.331	5.460.976.908	4.813.078.291	4.426.636.354	4.752.677.149	67,97%	68,14%	87,03%	-0,12%	-0,10%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.080.766.374	6.496.640.331	5.460.976.908	4.813.078.291	4.426.636.354	4.752.677.149	67,97%	68,14%	87,03%	-0,12%	-0,10%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.996.192	1.000.000	9.996.192	9.990.000	880.000	9.960.000	99,93%	88%	99,64%	4,05%	-0,39%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.996.192	1.000.000	9.996.192	9.990.000	880.000	9.960.000	99,94%	88%	99,64%	4,05%	-0,39%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.971.963	66.997.736	84.999.360	92.927.711	66.945.354	80.490.590	99,95%	99,92%	94,70%	-0,01%	-0,17%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.995.420	2.000.000	4.000.000	12.995.045	2.000.000	3.969.140	99,99%	100%	99,23%	0,08%	0%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.997.818	9.999.400	11.999.660	19.996.590	9.995.250	11.987.150	99,99%	99,96%	99,90%	-0,15%	-0,25%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.593.498	4.998.500	3.999.700	3.585.000	4.992.500	3.975.000	99,76%	99,88%	99,38%	0,10%	0,19%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.999.963	9.999.836	10.000.000	9.999.776	9.999.600	9.956.000	99,99%	100%	99,56%	0%	0%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.385.264	40.000.000	55.000.000	46.351.300	39.958.004	50.603.300	99,92%	99,90%	92,01%	0,12%	-0,11%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	459.354.896	412.526.655	458.933.015	362.499.130	373.315.699	358.073.519	78,91%	90,49%	78,02%	0,01%	-0,05%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.998.000	1.000.000	1.000.000	1.988.000	1.000.000	1.000.000	99,49%	100%	100%	-0,25%	-0,25%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.000.000	135.000.000	129.000.000	98.333.430	110.204.099	111.680.599	72,84%	81,63%	86,57%	-0,02%	0,09%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	322.356.896	276.526.655	328.933.015	262.167.700	262.111.600	245.392.920	81,33%	94,79%	74,60%	0,02%	-0,11%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-			Rata-Rata Pertumbuhan	
	I 2021	II 2022	III 2023	I 2021	II 2022	III 2023	I 2021	II 2022	III 2023	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	109.923.218	48.457.320	54.457.300	101.371.209	46.403.800	51.008.700	92,22%	95,76%	93,67%	-0,22%	-0,28%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.999.728	39.999.220	45.999.200	41.846.700	37.947.200	42.615.200	83,69%	94,87%	92,64%	-0,03%	-0,06%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.925.125	3.000.000	3.000.000	19.876.125	3.000.000	3.000.000	99,75%	100%	100%	-0,42%	-0,42%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.999.980	2.960.000	2.960.000	19.950.000	2.958.500	2.906.500	99,75%	99,95%	98,19%	-0,43%	-0,43%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.998.385	2.498.100	2.498.100	19.698.384	2.498.100	2.487.000	98,50%	100%	99,56%	-0,44%	-0,44%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	n/a	17.490.640	4.999.800	n/a	17.295.500	4.999.800	n/a	98,88%	88,68%	n/a	n/a
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	n/a	17.490.640	4.999.800	n/a	17.295.500	4.999.800	n/a	98,88%	88,68%	n/a	n/a
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	n/a	12.490.840	n/a	n/a	12.410.750	n/a	n/a	99,36%	n/a	n/a	n/a
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	n/a	4.999.800	4.999.800	n/a	4.884.750	4.434.000	n/a	97,70%	88,68%	n/a	n/a
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	62.728.719	466.316.214	663.415.544	62.692.439	461.627.960	653.076.216	99,94%	98,99%	98,44%	3,43%	3,18%
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	62.728.719	462.316.214	659.415.130	62.692.439	457.627.960	649.142.966	99,94%	98,98%	98,44%	3,40%	3,15%
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	27.728.884	410.316.364	592.066.180	27.728.140	407.378.460	582.644.066	100%	99,28%	98,41%	7,12%	6,84%
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	n/a	n/a	17.349.000	n/a	n/a	16.792.900	n/a	n/a	96,79%	n/a	n/a
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	34.999.835	51.999.850	49.999.950	34.964.299	50.249.500	49.706.000	99,90%	96,63%	99,41%	0,22%	0,23%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-			Rata-Rata Pertumbuhan	
	I 2021	II 2022	III 2023	I 2021	II 2022	III 2023	I 2021	II 2022	III 2023	Anggaran	Realisasi
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	n/a	4.000.000	2.999.994	n/a	4.000.000	2.932.930	n/a	100%	97,76%	n/a	n/a
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	n/a	4.000.000	2.999.994	n/a	4.000.000	2.932.930	n/a	100%	97,76%	n/a	n/a
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	n/a	0	1.000.420	n/a	0	1.000.320	n/a	0%	99,99%	n/a	n/a
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegritas	n/a	0	1.000.420	n/a	0	1.000.320	n/a	0%	99,99%	n/a	n/a
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	152.223.819	56.997.450	56.997.620	148.172.009	55.792.100	55.636.150	97,33%	97,88%	97,61%	-0,31%	-0,31%
Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/Kota	24.975.563	19.498.520	13.499.470	24.060.000	18.955.950	13.057.900	96,33%	97,21%	96,73%	-0,26%	-0,11%
Pelayanan Antar Kerja	24.975.563	11.998.530	5.499.880	24.060.000	11.962.000	5.339.800	96,33%	99,70%	97,09%	-0,53%	-0,26%
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	n/a	7.499.990	3.999.740	n/a	6.993.950	3.798.600	n/a	93,25%	94,97%	n/a	n/a
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	n/a	n/a	3.999.850	n/a	n/a	3.919.500	n/a	n/a	97,99%	n/a	n/a
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	117.248.354	32.499.030	32.498.440	114.125.509	32.018.400	31.788.650	97,33%	98,52%	97,82%	-0,36%	-0,36%
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	19.989.993	9.999.880	9.999.650	18.736.009	9.998.700	9.941.500	93,73%	99,99%	99,42%	-0,25%	-0,24%
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	n/a	9.999.840	9.999.840	n/a	9.985.000	9.615.750	n/a	99,85%	96,16%	n/a	n/a
Job Fair / Bursa Kerja	97.258.361	12.499.310	12.498.950	95.389.500	12.034.700	12.231.400	98,08%	96,28%	97,86%	-0,44%	-0,43%
Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kabupaten/Kota	9.999.902	4.999.900	4.999.870	9.986.500	4.817.750	4.882.800	99,86%	96,36%	97,66%	-0,25%	-0,25%
Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	9.999.902	4.999.900	4.999.870	9.986.500	4.817.750	4.882.800	99,87%	96,36%	97,66%	-0,25%	-0,25%
Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam satu daerah kabupaten/Kota	n/a	0	5.999.840	n/a	0	5.906.800	n/a	0%	98,45%	n/a	n/a
Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	n/a	0	5.999.840	n/a	0	5.906.800	n/a	0%	98,45%	n/a	n/a
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	19.993.314	16.199.290	18.191.500	19.566.300	15.961.590	17.909.270	97,86%	98,53%	98,45%	n/a	-0,09%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-			Rata-Rata Pertumbuhan	
	I 2021	II 2022	III 2023	I 2021	II 2022	III 2023	I 2021	II 2022	III 2023	Anggaran	Realisasi
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	n/a	8.999.670	6.998.240	n/a	8.773.970	6.907.550	n/a	97,49%	98,70%	n/a	n/a
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	n/a	3.000.000	2.998.250	n/a	2.910.500	2.998.250	n/a	97,02%	100%	n/a	n/a
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	n/a	5.999.670	3.999.990	n/a	5.863.470	3.909.300	n/a	97,73%	97,73%	n/a	n/a
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	19.993.314	7.199.620	11.193.260	19.566.300	7.187.620	11.001.720	97,86%	99,83%	98,29%	-0,04%	-0,32%
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.993.314	n/a	5.197.420	19.566.300	n/a	5.197.420	97,86%	n/a	100%	n/a	n/a
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan PerusahaanPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	n/a	n/a	998.280	n/a	n/a	832.200	n/a	n/a	83,36%	n/a	n/a
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	n/a	4.199.680	2.997.880	n/a	4.187.680	2.997.100	n/a	99,71%	99,97%	n/a	n/a
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	n/a	2.999.940	1.999.680	n/a	2.999.940	1.975.000	n/a	100%	98,77%	n/a	n/a
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	21.995.522	n/a	n/a	21.113.819	n/a	n/a	95,99%	n/a	n/a	n/a	n/a
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	21.995.522	n/a	n/a	21.113.819	n/a	n/a	95,99%	n/a	n/a	n/a	n/a

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-			Rata-Rata Pertumbuhan	
	I 2021	II 2022	III 2023	I 2021	II 2022	III 2023	I 2021	II 2022	III 2023	Anggaran	Realisasi
Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	21.995.522	n/a	n/a	21.113.819	n/a	n/a	95,99%	n/a	n/a	n/a	n/a
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	49.994.238	n/a	n/a	41.909.700	n/a	n/a	83,82%	n/a	n/a	n/a	n/a
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.994.238	n/a	n/a	41.909.700	n/a	n/a	83,82%	n/a	n/a	n/a	n/a
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.994.238	n/a	n/a	41.909.700	n/a	n/a	83,82%	n/a	n/a	n/a	n/a

Keterangan:

1	Nama program/kegiatan periode renstra sebelumnya	11	Realisasi anggaran tahun kelima renstra disusun
2	Anggaran awal atau tahun pertama renstra disusun	12	Rasio realisasi dan anggaran tahun pertama renstra disusun
3	Anggaran tahun kedua renstra disusun	13	Rasio realisasi dan anggaran tahun kedua renstra disusun
4	Anggaran tahun ketiga renstra disusun	14	Rasio realisasi dan anggaran tahun ketiga renstra disusun
5	Anggaran tahun keempat renstra disusun	15	Rasio realisasi dan anggaran tahun keempat renstra disusun
6	Anggaran tahun kelima renstra disusun	16	Rasio realisasi dan anggaran tahun kelima renstra disusun
7	Realisasi anggaran tahun pertama renstra disusun	17	Rata-rata pertumbuhan anggaran dari tabel keterangan 2-6
8	Realisasi anggaran tahun kedua renstra disusun	18	Rata-rata pertumbuhan realisasi dari tabel keterangan 7 -11
9	Realisasi anggaran tahun ketiga renstra disusun		
10	Realisasi anggaran tahun keempat renstra disusun		

Rumus Rasio:
$$\frac{Realisasi\ Tahun\ N}{Target\ Tahun\ N} \times 100\%$$

Rumus Pertumbuhan:
$$\frac{Anggaran: Realisasi\ Tahun\ N - Anggaran: Realisasi\ Tahun\ N-1}{Anggaran: Realisasi\ Tahun\ N-1} \times 100\%$$

**Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 (setelah perubahan nomenklatur SOTK PD)**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-	Realisasi Anggaran pada Tahun ke-	Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-	Rata-rata Pertumbuhan	
	I	I	I	Anggaran	Realisasi
	2024	2024	2024		
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.415.991.735	6.064.810.532	81,78%	-	-
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.999.750	19.994.202	99,97%	-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.999.750	19.994.202	99,97%	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.493.558.118	5.220.052.283	80,39%	-	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.493.558.118	5.220.052.283	80,39%	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.996.192	9.894.000	98,98%	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.996.192	9.894.000	98,98%	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.999.360	79.999.360	99,48%	-	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	3.998.370	99,96%	-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.999.660	11.989.430	99,91%	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.999.700	3.942.500	98,57%	-	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	9.972.300	99,72%	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	49.682.610	99,37%	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	548.981.015	475.986.968	86,70%	-	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100%	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.800.000	139.668.532	92,01%	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	396.181.015	335.318.436	84,64%	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	263.457.300	259.297.869	98,42%	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.999.200	37.462.500	93,66%	-	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	3.000.000	100%	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-	Realisasi Anggaran pada Tahun ke-	Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-	Rata-rata Pertumbuhan	
	I	I	I	Anggaran	Realisasi
	2024	2024	2024		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	217.960.000	216.342.369	99,26%	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.498.100	2.493.000	99,80%	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0%	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0%	-	-
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	4.999.800	4.979.609	99,60%	-	-
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	4.999.800	4.979.609	99,60%	-	-
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	4.999.800	4.979.609	99,60%	-	-
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	704.675.619	695.361.071	98,67%	-	-
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	698.675.625	689.362.771	98,67%	-	-
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	631.326.675	622.492.271	98,60%	-	-
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	17.349.000	17.295.500	99,69%	-	-
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	49.999.950	49.575.000	99,15%	-	-
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	2.999.994	2.999.300	99,98%	-	-
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	2.999.994	2.999.300	99,98%	-	-
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	3.000.000	2.999.000	99,97%	-	-
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	3.000.000	2.999.000	99,97%	-	-
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	143.497.780	142.700.300	99,44%	-	-
Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/Kota	91.721.470	91.214.000	99,45%	-	-
Pelayanan Antar Kerja	25.499.880	25.436.000	99,75%	-	-
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	34.999.740	34.880.000	99,66%	-	-
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	31.221.850	30.898.000	98,96%	-	-
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	46.776.440	46.515.900	99,44%	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-	Realisasi Anggaran pada Tahun ke-	Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-	Rata-rata Pertumbuhan	
	I	I	I	Anggaran	Realisasi
	2024	2024	2024		
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	9.999.650	9.847.500	98,48%	-	-
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	9.999.840	9.953.000	99,53%	-	-
Job Fair / Bursa Kerja	26.776.950	26.715.400	99,77%	-	-
Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kabupaten/Kota	4.999.870	4.970.400	99,41%	-	-
Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI)	4.999.870	4.970.400	99,41%	-	-
Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam satu daerah kabupaten/Kota	0	0	0%	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0%	-	-
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	30.694.970	30.609.400	99,72%	-	-
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.999.990	8.999.900	100%	-	-
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	5.000.000	5.000.000	100%	-	-
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	3.999.990	3.999.900	100%	-	-
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	21.694.980	21.609.500	99,61%	-	-
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.197.420	5.194.500	99,94%	-	-
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.000.000	3.924.500	98,11%	-	-
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	10.497.880	10.493.500	99,96%	-	-
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1.999.680	1.997.000	99,87%	-	-
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	n/a	n/a	n/a	-	-
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	n/a	n/a	n/a	-	-
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	n/a	n/a	n/a	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-	Realisasi Anggaran pada Tahun ke-	Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-	Rata-rata Pertumbuhan	
	I	I	I	Anggaran	Realisasi
	2024	2024	2024		
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	n/a	n/a	n/a	-	-
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.022.760.000	2.008.438.580	99,29%	-	-
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	2.022.760.000	2.008.438.580	99,29%	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2.022.760.000	2.008.438.580	99,29%	-	-
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	12.000. 000	11.159.500	93,00%	-	-
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	12.000.000	11.159.500	93,00%	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	7.000.000	6.905.900	98,66%	-	-
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	5.000.000	4.253.600	85,07%	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	34.999.600	34.929.500	99,80%	-	-
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	34.999.600	34.929.500	99,80%	-	-
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	15.000.000	14.962.000	99,75%	-	-
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	19.999.600	19.967.500	99,84%	-	-

c. Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri tahun 2025-2029, penting untuk memahami peran dan sinergi mitra Perangkat Daerah (PD) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pencari kerja. Berikut penjelasan berdasarkan data dan praktik di Kabupaten Wonogiri:

1. Mitra Internal Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri tidak bekerja sendiri, tetapi bersinergi dengan berbagai Perangkat Daerah (PD) lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi saling melengkapi, antara lain:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Mendukung penyediaan data lulusan SMA/SMK, serta penguatan Bursa Kerja Khusus (BKK) di sekolah untuk penyaluran lulusan ke dunia kerja.
- Dinas Sosial: Berperan dalam perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, termasuk pencari kerja dari keluarga kurang mampu atau penyandang disabilitas.
- Dinas Komunikasi dan Informatika: Mendukung penyebaran informasi lowongan kerja, pelatihan, dan program ketenagakerjaan melalui media digital dan sosial.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: Memastikan dokumen kependudukan pencari kerja valid, misalnya dalam pembuatan Kartu AK-1 (kartu kuning) sebagai syarat melamar kerja.
- Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan: Bersinergi dalam pengembangan wirausaha baru dan pelatihan keterampilan kerja.
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM): Mendukung pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM, termasuk

ASN yang terlibat dalam pelayanan ketenagakerjaan.

2. Mitra Eksternal (Swasta dan Lembaga Pendidikan)

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Wonogiri juga bersinergi dengan mitra eksternal, di antaranya:

- Perusahaan/Industri: Menjadi mitra utama dalam penyerapan tenaga kerja melalui partisipasi di *Job Fair*, rekrutmen langsung, dan program magang. Pada event *Job Fair*, puluhan perusahaan dari berbagai sektor (garmen, otomotif, kesehatan, manufaktur, ritel, keuangan, dsb.) terlibat aktif menyediakan ribuan lowongan kerja.
- Bursa Kerja Khusus (BKK) SMA/SMK: Sekolah-sekolah menengah di Kabupaten Wonogiri memiliki BKK yang berperan sebagai penghubung antara lulusan dan dunia kerja, serta aktif menginformasikan event ketenagakerjaan kepada alumni.
- Lembaga Pelatihan Kerja (BLK/UPTD BLK): Menyediakan pelatihan keterampilan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, baik bagi pencari kerja maupun pekerja yang ingin meningkatkan kompetensi.

3. Sinergi dan Kolaborasi dalam Pelayanan Pelayanan kepada pencari kerja di Kabupaten Wonogiri diwujudkan melalui:

- *Job Fair* Terintegrasi: Kolaborasi antara Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri, perusahaan, BKK sekolah, dan OPD terkait dalam penyelenggaraan *Job Fair* yang rutin digelar di Mall Pelayanan Publik atau tempat strategis lainnya. *Job Fair* ini menyediakan ribuan lowongan dan layanan konsultasi karir, serta rekrutmen langsung.

- Pelatihan dan Sertifikasi: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri bersama BLK dan mitra industri menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja.
- Penyebaran Informasi: Optimalisasi media sosial dan kanal digital oleh Diskominfo dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri untuk menyebarluaskan informasi lowongan, pelatihan, dan program ketenagakerjaan.
- Pelayanan Administrasi: Dukungan Disdukcapil dalam validasi dokumen kependudukan dan penerbitan Kartu AK-1, serta layanan administrasi lainnya yang dibutuhkan pencari kerja.

4. Dukungan Kebijakan dan Data

Sinergi antar perangkat daerah juga didukung oleh kebijakan dan data lintas sektor, seperti data pengangguran, lulusan sekolah, serta pemetaan kebutuhan tenaga kerja yang dikoordinasikan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan OPD terkait.

Mitra Perangkat Daerah dalam pelayanan kepada masyarakat/pencari kerja di Kabupaten Wonogiri meliputi OPD lintas sektor, perusahaan/industri, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Sinergi dan kolaborasi diwujudkan dalam bentuk *Job Fair*, pelatihan, penyebaran informasi, dan pelayanan administrasi, dengan tujuan meningkatkan penempatan kerja, menekan pengangguran, serta mendukung pengembangan SDM daerah secara berkelanjutan.

d. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Wonogiri memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin), khususnya dalam penguatan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan pelaku usaha lokal.

Bentuk Dukungan BUMD sebagai berikut:

- **Akses Permodalan dan Inklusi Keuangan**
BUMD sektor perbankan seperti PT BPR Bank Wonogiri Perseroda berperan penting dalam memberikan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Wonogiri. Dukungan ini sangat krusial untuk memperluas kesempatan kerja, mendorong wirausaha baru, serta meningkatkan daya saing industri lokal. Pelatihan literasi keuangan dan pendampingan akses ke lembaga keuangan BUMD menjadi salah satu program nyata yang telah dijalankan bersama Disnakerin dan dinas terkait.
- **Kolaborasi dalam Pelatihan dan Pemberdayaan SDM**
BUMD dapat menjadi mitra dalam program pelatihan vokasi, magang, atau penyaluran tenaga kerja di sektor-sektor yang dikelolanya. Kolaborasi ini membantu meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal dan mempercepat penyerapan tenaga kerja di daerah.
- **Kontribusi pada Peningkatan Kesejahteraan**
BUMD seperti Perumda Air Minum Giri Tirta Sari berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti air bersih, yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan produktivitas tenaga kerja.
- **Dukungan Kebijakan dan Inovasi**
Pemerintah Kabupaten Wonogiri secara aktif mendorong kebijakan yang mendukung kemajuan BUMD, seperti kebijakan inklusi keuangan dan digitalisasi layanan. Kebijakan ini diimplementasikan oleh BUMD sehingga mampu memperkuat ekosistem ekonomi daerah dan mendukung program-program Disnakerin, baik di bidang ketenagakerjaan maupun pengembangan industri.

Dukungan BUMD di Kabupaten Wonogiri kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri diwujudkan melalui:

- Penyediaan akses permodalan bagi UMKM dan pelaku industri
- Kolaborasi pelatihan, pendampingan, dan penyaluran tenaga kerja
- Peningkatan layanan dasar yang mendukung produktivitas tenaga kerja
- Implementasi kebijakan inovatif untuk memperkuat ekonomi daerah

Sinergi ini menjadi kunci dalam pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri tahun 2025-2029, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan

e. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab PD

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri memiliki tanggung jawab penting dalam membangun dan mengelola kerjasama daerah guna mendukung pencapaian tujuan strategis di bidang ketenagakerjaan dan perindustrian. Berikut penjelasan bentuk dan ruang lingkup kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri:

- Kerjasama Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri secara aktif menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di wilayah Solo Raya, Yogyakarta, Semarang, bahkan luar provinsi seperti Malang, untuk membuka peluang kerja bagi masyarakat Wonogiri. Kerjasama ini diwujudkan melalui penyelenggaraan *Job Fair* yang rutin digelar di Mall Pelayanan Publik dan pendopo rumah dinas Bupati Wonogiri, serta melalui rekrutmen langsung bersama perusahaan seperti PT. Indomarco Prismaatama. Kerjasama ini sangat membantu penyerapan tenaga kerja lokal dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Wonogiri.

- Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan dan Bursa Kerja Khusus (BKK)

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri menjalin kerjasama dengan SMA/SMK serta Bursa Kerja Khusus (BKK) di sekolah untuk memastikan lulusan sekolah dapat tersalurkan ke dunia kerja. Lulusan yang belum terserap difasilitasi melalui event *Job Fair* atau program pelatihan dan magang yang diselenggarakan bersama mitra industri.

- Sinergi dengan Pemerintah Daerah Lain dan Instansi Vertikal

Kerjasama juga dilakukan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten/Kota lain, serta instansi vertikal seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Sinergi ini bertujuan untuk sinkronisasi kebijakan, pertukaran data pasar kerja, serta pelaksanaan program-program prioritas ketenagakerjaan dan transmigrasi.

- Pengembangan Klaster Industri dan UMKM

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri berperan dalam pengembangan klaster usaha dan kawasan industri, termasuk mendorong UMKM agar mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor. Kerjasama dilakukan dengan dinas terkait, BUMD, dan pelaku usaha untuk penguatan klaster industri, pertanian, dan pariwisata yang menjadi potensi ekonomi lokal.

- Pelatihan, Sertifikasi, dan Peningkatan Kompetensi SDM

Kerjasama dengan lembaga pelatihan, UPTD BLK, dan perusahaan dilakukan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, serta program magang. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja Wonogiri agar sesuai dengan kebutuhan industri.

- Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri juga bertanggung jawab dalam kerjasama lintas sektor untuk pembinaan hubungan industrial, penyelesaian perselisihan, pengawasan norma kerja, serta perlindungan tenaga kerja, termasuk pengawasan pelaksanaan K3 dan jaminan sosial tenaga kerja.

f. Inovasi Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri menjalankan berbagai inovasi strategis untuk meningkatkan pelayanan, pengembangan kompetensi tenaga kerja, dan penyerapan tenaga kerja yang efektif. Berikut beberapa inovasi utama yang dijalankan:

- Super Gen Z
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri mengembangkan kurikulum pelatihan inovatif bernama "Super Gen Z" yang dirancang khusus untuk mempersiapkan generasi muda agar tangguh dan siap menghadapi tantangan dunia kerja modern. Pendekatan ini menyesuaikan pelatihan dengan kebutuhan industri dan tren teknologi terkini sehingga meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Inovasi ini dikembangkan oleh UPTD BLK Kabupaten Wonogiri.
- *Work Readiness Programe* (WRP)
Inovasi ini merupakan program pelatihan kesiapan kerja yang menyeluruh dan terintegrasi, menggabungkan pelatihan *soft skills*, *career skills*, dan *life skills*, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja di pasar tenaga kerja saat ini. Inovasi ini dikembangkan oleh Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri sebagai berikut:

- **Kompetensi dan Kapabilitas SDM**
Keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang handal, visioner, dan profesional. Keterbatasan SDM yang kompeten di Disnakerin menjadi tantangan utama dalam meningkatkan kualitas layanan dan pencapaian target pembangunan ketenagakerjaan.
- **Tingkat Pengangguran dan Penyerapan Tenaga Kerja**
Meskipun tingkat pengangguran di Kabupaten Wonogiri relatif lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional, angka pengangguran masih cukup tinggi dan menjadi masalah yang harus ditangani secara serius. Informasi peluang kerja yang belum merata dan mekanisme penempatan tenaga kerja yang belum optimal juga menjadi hambatan.
- *Link and Match* Pasar Kerja
Belum optimalnya sinergi antara pencari kerja dan pengguna tenaga kerja (perusahaan) menyebabkan persaingan yang tinggi dan ketidaksesuaian kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi tenaga kerja lokal.
- **Sarana dan Prasarana Pelatihan**
Fasilitas pelatihan yang ada, seperti Balai Latihan Kerja (BLK), menghadapi kendala sarana dan prasarana yang usang serta berkurangnya instruktur kompeten akibat

purna tugas, sehingga menghambat peningkatan produktivitas tenaga kerja.

- **Keterbatasan Personil dan Struktur Organisasi**
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri belum memiliki struktur perangkat di tingkat kecamatan, sehingga pelayanan dan pengawasan di lapangan kurang optimal. Jumlah personil yang terbatas juga menghambat pelaksanaan tugas, terutama di bidang penempatan tenaga kerja.
- **Kelembagaan Hubungan Industrial dan Data Ketenagakerjaan**
Lemahnya kelembagaan hubungan industrial, kurangnya sosialisasi kebijakan ketenagakerjaan, serta belum adanya data ketenagakerjaan yang valid menjadi tantangan dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan produktif.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

- **Posisi Strategis dan Pasar ASEAN (MEA)**
Letak geografis Kabupaten Wonogiri yang strategis dan potensi pasar ASEAN memberikan peluang besar untuk menarik investor dan memperluas pasar tenaga kerja. Hal ini dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan kapasitas SDM lokal.
- **Peningkatan Investasi dan Industri Lokal**
Meningkatnya jumlah investor di daerah membuka peluang kerja baru dan pengembangan sektor industri, yang dapat dioptimalkan melalui program *link and match* dan pelatihan vokasi yang sesuai kebutuhan industri.
- **Pengembangan Teknologi dan Digitalisasi Layanan**
Pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan ketenagakerjaan seperti layanan *online* pembuatan

Kartu AK-1, Bursa Kerja *Online*, dan penyebaran informasi melalui media sosial dapat mempercepat akses dan transparansi layanan.

- Kolaborasi dan Sinergi dengan Stakeholder

Kerjasama dengan berbagai pihak seperti BUMD, lembaga pendidikan, perusahaan, dan pemerintah daerah lain memberikan peluang untuk memperkuat program ketenagakerjaan, pelatihan, dan penempatan tenaga kerja secara lebih efektif.

- Program Unggulan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri

Program seperti penyempurnaan layanan ketenagakerjaan berbasis online, pengembangan *Job Fair*, fasilitasi penempatan tenaga kerja ke luar negeri (misalnya Jepang), pemberdayaan hubungan industrial, dan revitalisasi Balai Latihan Kerja menjadi peluang strategis untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.

2.2.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri. Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri yaitu: “Produktivitas Tenaga Kerja, Perlindungan Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah” yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.11 Rumusan Permasalahan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1.	Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Sarana dan prasarana pelatihan yang kurang memadai (infrastruktur UPTD BLK yang kurang memadai, instruktur yang pensiun)
2.	Penempatan tenaga kerja belum optimal dan informasi peluang kerja kurang merata	Tidak adanya perangkat di tingkat kecamatan, keterbatasan SDM pelayanan
		Kurangnya <i>link and match</i> antara kebutuhan industri dan kompetensi tenaga kerja
3.	Lemahnya kelembagaan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan	Kurangnya sosialisasi kebijakan ketenagakerjaan dan mediator hubungan industrial
4.	Jaminan sosial tenaga kerja belum optimal	Sistem verifikasi dan pengawasan yang belum maksimal
5.	Pengembangan industri masih terbatas dan kurangnya inovasi	Kurangnya pengelolaan dan pengawasan yang efektif

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
		terhadap norma, standar, dan perizinan industri
6.	Pemberdayaan industri kecil dan menengah belum maksimal	Keterbatasan fasilitasi dan promosi investasi serta kerjasama kelembagaan
7.	Kurangnya koordinasi lintas sektor dan kelembagaan	Kapasitas SDM yang terbatas dan sistem pengelolaan data ketenagakerjaan yang belum terintegrasi
8.	Data ketenagakerjaan tidak valid dan kurang terintegrasi	Kurangnya sistem informasi dan monitoring yang efektif
9.	Proses perizinan lambat dan kurang transparan	Kurangnya digitalisasi layanan dan sumber daya manusia yang memadai

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
Tenaga kerja di Kabupaten Wonogiri masih banyak yang belum memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri. Hal ini disebabkan oleh sarana dan prasarana pelatihan yang kurang memadai, seperti infrastruktur UPTD BLK yang sudah harus di-*upgrade*, alat praktik yang terbatas, serta jumlah instruktur yang semakin berkurang karena banyak yang pensiun. Akibatnya, pelatihan yang diberikan kurang efektif dalam meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
2. Penempatan tenaga kerja belum optimal dan informasi peluang kerja kurang merata;
Akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja dan layanan penempatan masih terbatas, terutama di wilayah kecamatan. Hal ini karena belum adanya

perangkat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri di tingkat kecamatan dan keterbatasan SDM pelayanan. Selain itu, belum optimalnya *link and match* antara kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja lokal menyebabkan banyak lulusan yang tidak terserap dunia kerja.

3. Lemahnya Kelembagaan Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan;

Hubungan industrial di Kabupaten Wonogiri belum berjalan harmonis karena kurangnya sosialisasi kebijakan ketenagakerjaan dan minimnya peran Mediator Hubungan Industrial.

4. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Belum Optimal;

Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja, seperti BPJS Ketenagakerjaan, belum berjalan maksimal karena sistem verifikasi dan pengawasan yang belum efektif. Banyak pekerja, khususnya di sektor informal dan UMKM, belum terlindungi program jaminan sosial secara menyeluruh.

5. Pengembangan Industri Masih Terbatas dan Kurangnya Inovasi;

Pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Wonogiri masih lambat, dengan minimnya inovasi dan diversifikasi produk. Hal ini disebabkan kurangnya pengelolaan dan pengawasan efektif terhadap norma, standar, dan perizinan industri, sehingga industri kecil dan menengah sulit berkembang dan bersaing.

6. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Belum Maksimal;

Industri Kecil dan Menengah (IKM) belum mendapatkan fasilitasi dan promosi investasi yang memadai. Keterbatasan akses pada pembinaan, permodalan, serta kerjasama kelembagaan menyebabkan IKM sulit naik kelas dan memperluas pasar.

7. Kurangnya Koordinasi Lintas Sektor dan Kelembagaan; Koordinasi antara Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dengan OPD/Instansi lain, dunia usaha, dan lembaga pendidikan masih lemah. Kapasitas SDM untuk mengelola data dan program ketenagakerjaan juga terbatas, sehingga banyak program yang berjalan sendiri-sendiri dan kurang terintegrasi.

8. Data Ketenagakerjaan Tidak Valid dan Kurang Terintegrasi;

Data ketenagakerjaan yang ada masih tersebar di berbagai instansi dan belum terintegrasi secara digital. Kurangnya sistem informasi dan monitoring yang efektif menyebabkan perencanaan dan pengambilan kebijakan tidak berbasis data yang akurat.

9. Proses Perizinan Lambat dan Kurang Transparan;

Pelayanan perizinan usaha di bidang industri dan ketenagakerjaan masih lambat dan kurang transparan. Hal ini disebabkan kurangnya digitalisasi layanan serta keterbatasan SDM yang mengelola proses perizinan, sehingga menghambat investasi dan pertumbuhan industri.

Penjelasan di atas memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan utama yang perlu menjadi fokus dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri tahun 2025–2029, agar pelayanan publik, penyerapan tenaga kerja, serta pengembangan industri dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

2.2.2 Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RJPMN 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis nasional yang menjadi pedoman utama bagi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam

menyusun Rencana Strategis dan Program Kerja. RPJMN ini mengintegrasikan isu-isu global dan nasional yang berdampak pada pembangunan daerah, termasuk lingkup tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri. Isu Global dan Nasional dalam RPJMN 2025-2029 yang relevan dengan lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri, di antaranya:

- Transformasi Sosial dan Ekonomi di Era Globalisasi
Dalam RPJMN menyoroti tantangan global berupa perubahan cepat teknologi, digitalisasi, dan revolusi industri 4.0 yang memengaruhi pasar tenaga kerja dan pola kerja nasional. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri perlu menyesuaikan strategi pengembangan SDM dan pelatihan vokasi agar tenaga kerja lokal siap menghadapi kebutuhan industri modern dan ekonomi digital.
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
RPJMN menempatkan pembangunan SDM sebagai prioritas utama, dengan target peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) dan pengurangan kemiskinan. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri harus fokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi, dan penguatan *link and match* antara dunia pendidikan dan industri.

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih



Gambar 2.23 Visi Kabupaten Wonogiri 2025-2029

VISI:

“WONOGIRI YANG BERDAYA SAING, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”

Dalam **rumusan** visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Wonogiri dijelaskan sebagai berikut.

- 1. **Berdaya Saing**, Terwujudnya Kabupaten Wonogiri yang berdaya saing secara ekonomi melalui penguatan sektor ekonomi unggulan yang produktif dan meningkatkan lapangan pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi diikuti dengan peningkatan kualitas manusia Wonogiri yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan daya saing. Kondisi ekonomi yang meningkat dan mampu bersaing dengan wilayah sekitar juga didukung dengan peningkatan kualitas, kapasitas dan pemerataan infrastruktur, konektivitas antar wilayah yang terpadu, handal, aman, nyaman, terjangkau, dan merata guna meningkatkan mobilitas warga, kelancaran distribusi

barang dan jasa, mengurangi ketimpangan antar wilayah.

- 2. **Maju**, pokok visi ini memiliki arti bahwa pembangunan ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Wonogiri sebagai wilayah dengan segenap potensi sumber daya alam, sumber daya manusia berprestasi, menuju modernisasi berbasis riset, pemanfaatan teknologi dan kreativitas.
- 3. **Sejahtera**, Wonogiri Sejahtera dapat digambarkan melalui pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan akses pelayanan publik yang memadai disertai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 4. **Berkelanjutan**, Seiring dengan Wonogiri melaksanakan pembangunan berkelanjutan maka akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendapatkan lingkungan dan permukiman yang layak dan nyaman, bebas pencemaran dan polusi, serta kondisi alam yang semakin terjaga kelestariannya dengan baik. Pembangunan di Wonogiri yang berkelanjutan juga mempertimbangkan risiko bencana dan menyiapkan mitigasi dari dampak yang ditimbulkan mengingat Wonogiri memiliki potensi dan jenis bencana alam yang beragam karena kondisi geografis.



Gambar 2.24 Misi Kabupaten Wonogiri 2025-2029

MISI:

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dengan memerhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Wonogiri dijelaskan sebagai berikut.

MISI 1: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi di tunjukkan dengan proses secara terus menerus untuk mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, terutama dengan menggerakkan sektor-sektor unggulan daerah yang didukung dengan pembangunan infrastruktur dalam hal distribusi barang dan jasa, serta upaya peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, terutama dengan penyediaan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap dan sesuai dengan standar, peningkatan kelancaran serta keselamatan perjalanan dan transportasi, didukung juga dengan peningkatan

kualitas, jaringan transportasi dan pelayanan transportasi umum.

MISI 2: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Didukung Lingkungan Sosial dan Budaya Masyarakat Maju.

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan ketahanan pangan, perumahan layak, kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan, menyediakan jaminan sosial masyarakat dan jaminan keamanan, menciptakan kondisi lingkungan sosial yang kondusif, memberikan ruang yang cukup dalam penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan masyarakat.

MISI 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Pengelolaan birokrasi pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif melalui peningkatan kualitas ASN dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

MISI 4: Mewujudkan Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana.

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan serta peningkatan ketahanan bencana daerah.

Kemudian untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang akan menjadi agenda pembangunan tahunan pemerintah daerah untuk mencapai visi dan misi tersebut, ditetapkan 7 program prioritas daerah daerah di dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan pertumbuhan ekonomi baru;
2. Membangun ekonomi kreatif;
3. Membangun layanan pendidikan dan kesehatan yang berorientasi kebutuhan masyarakat;
4. Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran;
5. Penguatan birokrasi yang dinamis;
6. Membangun sumber daya manusia yang unggul

berbasis riset dan inovasi; dan

7. Peningkatan sumber daya alam yang lestari.

Berdasarkan uraian keempat misi di atas, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri sesuai tugas pokok dan fungsinya pada bidang ketenagakerjaan dan perindustrian, berperan untuk mendukung Misi Pertama dengan adanya peningkatan produktivitas tenaga kerja dan membangun pertumbuhan UMKM dan pelaku usaha industri. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing dan berkompeten melalui Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.

**c. Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia**

1. Arah dan Visi Nasional

Rencana Tenaga Kerja Nasional (RTKN) 2025–2029 yang disusun Kementerian Ketenagakerjaan menjadi acuan strategis pembangunan ketenagakerjaan nasional yang berkelanjutan dan inklusif, serta mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dokumen ini menekankan pentingnya kebijakan berbasis data, adaptif, dan inovatif untuk menghadapi tantangan global seperti revolusi industri 4.0, transformasi digital, peningkatan produktivitas, pengangguran, dan bonus demografi yang hanya terjadi sekali dalam sejarah bangsa.

2. Isu Strategis Ketenagakerjaan Nasional

Beberapa isu strategis yang diidentifikasi dalam RTKN 2025–2029 dan relevan untuk diadopsi dalam Renstra Disnakerin Wonogiri antara lain:

- a) Daya saing dan produktivitas tenaga kerja;
- b) Akses dan penciptaan lapangan kerja baru;
- c) Perlindungan tenaga kerja, termasuk di sektor informal;

- d) Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan teknologi;
- e) Penguatan lembaga pelatihan kerja daerah; dan
- f) Sinergi lintas sektor dan wilayah dalam pembangunan ketenagakerjaan.

3. Tren dan Proyeksi Ketenagakerjaan 2025–2029

RTKN memproyeksikan tren positif, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja naik menjadi 72,25% dan tingkat pengangguran terbuka turun ke 4%. Fokus utama strategi nasional adalah:

- a) Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis teknologi;
- b) Pengembangan sektor hijau (green jobs) dan transisi energi;
- c) Penyiapan tenaga kerja untuk mendukung hilirisasi industri; dan
- d) Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam memanfaatkan bonus demografi dan transformasi digital.

4. Implikasi untuk Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri

Dalam menyusun Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri 2025–2029, beberapa hal berikut perlu menjadi perhatian agar selaras dengan kebijakan nasional:

- a) Sinkronisasi Program: Setiap program dan kegiatan harus mengacu pada arah kebijakan nasional, terutama dalam pengembangan SDM, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan tenaga kerja;
- b) Pelatihan dan Sertifikasi: Prioritaskan pelatihan berbasis kebutuhan industri lokal, penguatan BLK, serta sertifikasi kompetensi tenaga kerja;
- c) Peningkatan Produktivitas: Dorong inovasi dan adopsi teknologi di sektor industri dan UMKM lokal untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing;

- d) Penguatan Informasi Pasar Kerja: Kembangkan sistem informasi pasar kerja daerah yang terintegrasi dengan pusat, untuk memudahkan penempatan dan penyerapan tenaga kerja;
- e) Kolaborasi dan Sinergi: Bangun kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga pendidikan untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas SDM;
- f) Perlindungan Tenaga Kerja: Perkuat perlindungan bagi pekerja sektor informal dan pekerja rentan, termasuk melalui jaminan sosial ketenagakerjaan.

RTKN 2025–2029 menekankan pentingnya perencanaan ketenagakerjaan yang berbasis data, adaptif, dan inovatif. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri harus menjabarkan visi, misi, dan program secara operasional, serta mensinergikan kebijakan pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan perlindungan tenaga kerja di Wonogiri. Dengan mengadopsi dan mengadaptasi arah strategis nasional ke dalam konteks lokal, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri 2025–2029 dapat menjadi dokumen perencanaan yang relevan, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Wonogiri.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Berdasarkan dokumen strategis Kementerian Perindustrian dan RPJMN 2025–2029, berikut analisis kritis yang relevan untuk penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri 2025-2029:

1. Arah Kebijakan Nasional

Kementerian Perindustrian fokus pada:

- a) Peningkatan kontribusi industri pengolahan non-migas ke PDB nasional menjadi 20,92% pada 2029 melalui pertumbuhan 8,59% per tahun;

- b) Penguatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) lokal, termasuk agro, tambang, dan kelautan;
- c) Transformasi industri menuju teknologi tinggi dan berkelanjutan (*green industry*).

2. Prioritas Sektor Industri

Tiga proyek utama yang perlu diintegrasikan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.12 Prioritas Sektor Industri

Fokus Nasional	Implikasi untuk Kabupaten Wonogiri
Hilirisasi SDA	Pengolahan komoditas unggulan (pertanian, mineral) menjadi produk bernilai tambah tinggi
Penguatan IKM	Integrasi UMKM lokal dalam rantai pasok industri nasional melalui sertifikasi dan peningkatan kapasitas produksi.
Kawasan Industri Terpadu	Pengembangan klaster industri berbasis potensi lokal (misal: agroindustri, kerajinan) selaras dengan kebijakan Kemenperin.

3. Strategi Operasional

Pelatihan SDM Industri:

- a) Prioritas pelatihan berbasis kompetensi untuk sektor prioritas (agroindustri, tekstil, elektronik);
- b) Kolaborasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan industri untuk penyediaan tenaga kerja tersertifikasi.

Penciptaan Ekosistem Industri Hijau:

- a) Adopsi teknologi ramah lingkungan dan efisiensi energi di sektor manufaktur;
- b) Pembiayaan hijau melalui skema KUR atau dana CSR perusahaan.

Digitalisasi dan Inovasi:

- a) Pemanfaatan platform *e-commerce* untuk pemasaran produk IKM;

- b) Integrasi sistem informasi pasar kerja dengan pusat data nasional.

4. Tantangan dan Rekomendasi

Anggaran Terbatas:

Kemenperin mengalokasikan Rp 2,519 triliun pada 2025 dengan target efisiensi 60% serapan anggaran per September. Rekomendasi:

- a) Optimalisasi dana desa dan APBD untuk program pelatihan dan pengembangan IKM;
- b) Kemitraan dengan swasta melalui skema CSR *matching fund*.

Bonus Demografi:

Wonogiri perlu menyiapkan program magang industri dan kewirausahaan pemuda untuk menyerap 72,25% angkatan kerja.

5. Sinergi Kebijakan

Integrasi Peta Jalan Jasa Industri Kemenperin ke dalam RPJMN 2025–2029, yang mencakup:

- a) Pengembangan layanan logistik industri berbasis digital.
- b) Sertifikasi jasa perawatan mesin dan teknologi untuk IKM.

Dengan memadukan kebijakan nasional ini, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dapat fokus pada penguatan rantai nilai industri lokal, peningkatan daya saing tenaga kerja, dan pengembangan ekosistem industri berkelanjutan yang selaras dengan target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonogiri.

d. Telaahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Telaahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

dengan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 sebagai berikut.

- Konteks Kebijakan Provinsi:

Jawa Tengah menekankan penguatan pelatihan kerja sebagai fokus utama untuk meningkatkan daya saing SDM dengan mendukung transformasi digital dan revolusi industri 4.0, yang selaras dengan tantangan nasional ketenagakerjaan dan kebutuhan pasar tenaga kerja modern.

- Sinergi dengan Kabupaten Wonogiri:

- Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah cenderung memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang relevan, yang dapat menjadi landasan dan dukungan terhadap program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja yang diangkat oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.

- Program-program perlindungan tenaga kerja, peningkatan penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan industri kecil menengah di Kabupaten Wonogiri dapat diintegrasikan dengan kebijakan provinsi agar mendapat prioritas pendanaan dan fasilitasi kebijakan di tingkat provinsi.

- Sinkronisasi Strategi:

- Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah memuat strategi penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah sebagai upaya percepatan pencapaian target ketenagakerjaan dan pengembangan industri yang berdaya saing.

- Evaluasi dan monitoring kinerja program pelatihan, penempatan, serta perlindungan pekerja di tingkat Kabupaten seperti di Kabupaten Wonogiri

diharapkan dapat terfasilitasi dengan standar dan pedoman yang berasal dari provinsi.

- Titik Fokus Perbedaan dan Peluang Kolaborasi:
 - Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri memiliki arah kebijakan operasional yang spesifik pada kebutuhan lokal dan karakteristik Kabupaten Wonogiri, sementara Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah lebih bersifat makro dan menysasar penguatan kapasitas SDM serta sinergi antar daerah.
 - Peluang kolaborasi dapat diwujudkan dalam program pelatihan teknologi untuk *machinist* dan operator modern, serta pengembangan klaster industri kecil, seiring dengan program pengembangan kawasan dan transmigrasi provinsi.

e. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Pemanfaatan pembangunan wilayah Kabupaten Wonogiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun

2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020–2040 memuat rencana struktur dan pola Pemanfaatan Ruang yang meliputi Tujuan Penataan Ruang, Kebijakan dan Strategi, Struktur Ruang Wilayah, Pola Ruang Wilayah, Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten, Arah Pemanfaatan Ruang wilayah, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dan Peran Serta Masyarakat. Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten sebagai pusat pertumbuhan pariwisata dan industri dengan didukung sektor pertanian yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta mengedepankan sumber daya lokal dan berdaya saing.

Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang wilayah ditetapkan kebijakan Penataan Ruang wilayah Kabupaten sebagai berikut:

- a) Pemantapan fungsi dan kedudukan Kabupaten dalam kawasan andalan;
- b) Pengembangan Kawasan Pariwisata;
- c) Pengembangan dan optimalisasi pertumbuhan industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- d) Perlindungan dan optimalisasi Kawasan Pertanian;
- e) Pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f) Pengembangan dan pemantapan pusat kegiatan terpadu;
- g) Pengembangan dan optimalisasi kawasan strategis; dan
- h) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Sebagai dinas teknis yang mengampu urusan ketenagakerjaan dan perindustrian, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri mengampu kebijakan Penataan Ruang wilayah kabupaten huruf (a) dan (c) yakni pemantapan fungsi dan kedudukan Kabupaten dalam kawasan andalan dan pengembangan dan optimalisasi pertumbuhan industri yang berwawasan

lingkungan dan berkelanjutan.

Adapun yang dimaksud dengan pemantapan fungsi dan kedudukan Kabupaten dalam kawasan andalan yakni sebagai pusat informasi dan layanan ketenagakerjaan dan perindustrian yang dipusatkan di Kabupaten dan didukung dengan adanya Mall Pelayanan Publik (MPP) yang dapat membantu masyarakat mendapatkan informasi dengan lebih efektif dan efisien. Sedangkan untuk pengembangan dan optimalisasi pertumbuhan industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, yakni mendorong pelaku usaha industri dan meningkatkan pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui program dan kebijakan yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.

f. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan dokumen Laporan Utama KLHS RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029, isu yang terkait dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri adalah Tingginya Angka Kemiskinan sebagai mana diketahui bahwa juga tidak terlepas dari dukungan Jamninan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. Tema isu tersebut sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.13 berikut.

Tabel 2.13 Tema Isu KLHS terhadap Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Tingginya Angka Kemiskinan	1. Upah rata-rata per jam pekerja.
	2. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.

Sumber: Laporan Utama KLHS RPJMD Kab. Wonogiri Tahun 2025-2029

Sementara itu terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, berikut indikator tujuan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Wonogiri yang sesuai dengan wewenang Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri sebagai berikut.

Tabel 2.14 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sesuai dengan Wewenang Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029

No	Tujuan Global	Sasaran Global	Indikator	Target					Target Perpres 111/2022	Skenario upaya
				2025	2026	2027	2028	2029		
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	- Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)	37,75	38,00	38,25	38,40	38,64	Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat menjadi 3,7-4,5%. Tahun dasar 2020: -1,84 (Sumber data: Badan Pusat Statistik).	Mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing serta memperkuat sektor perindustrian di Kabupaten Wonogiri; dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yang baik
			- Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	17,80	17,85	17,90	17,95	18,00		

2.2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan, Renstra Kementerian Perindustrian, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah telaahan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Wonogiri tahun 2020-2040 dan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri sebagai berikut:

Tabel 2.15 Isu Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Target			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1. Ketersediaan tenaga kerja usia produktif yang tinggi; 2. Pelayanan akses informasi terkait perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja; 3. Potensi UMKM dan Industri Kecil Menengah (IKM); 4. Sumber daya alam mendukung sektor industri pengolahan.	1. Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi; 2. Mismatch antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri; 3. Ketidakterseediaan data pekerja rentan atau pekerja informal; 4. Rendahnya produktivitas dan daya saing industri kecil; 5. Keterbatasan akses pelatihan dan permodalan.	Tingginya Angka Kemiskinan	- SDGs 8 (Pekerjaan Layak, Pertumbuhan Ekonomi) - SDGs 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur)	RPJMN: Penurunan TPT, peningkatan produktivitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, pengembangan industri berkelanjutan.	RPJMD: Penurunan TPT, peningkatan TPAK, peningkatan cakupan kepesertaan jamsostek, penguatan IKM berbasis potensi lokal.	1. Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja; 2. Penurunan angka pengangguran 3. Penyediaan dan peningkatan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, formal dan informal; 4. Penguatan ekosistem industri ramah lingkungan; 5. Pengembangan UMKM/IKM berbasis sumber daya lokal.

Sumber: Laporan KLHS Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena berdampak sangat penting bagi perangkat daerah. Isu strategis dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri adalah:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja;
2. Penurunan angka pengangguran;
3. Penyediaan dan peningkatan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, formal dan informal;
4. Penguatan ekosistem industri ramah lingkungan; dan
5. Pengembangan UMKM/IKM berbasis sumber daya lokal.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kabupaten Wonogiri berpedoman pada visi dan misi Bupati yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2021-2026 visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri sesuai dengan visi dan misi RPJMD, kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.

3.1. TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang ketenagakerjaan dan perindustrian. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Tenaga

Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri untuk periode 2025-2029 disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.07.3.32.3.31.10.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN											
- Terwujudnya ekonomi yang berdayasaing, dan berkelanjutan	Mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing serta memperkuat sektor perindustrian di Kabupaten dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yang baik		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)	37,53	37,75	38	38,25	38,4	38,64	38,82	
			Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	17,75	17,8	17,85	17,9	17,95	18	18,05	
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang berkualitas	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	67,63	70,35	70,5	71,7	72,7	73,9	74,9	
			Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)	97,6	96,7	97,65	97,68	97,7	97,73	97,75	
		Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	35,25	52,69	56,71	59,65	62,74	66	68,04	
		Meningkatnya partisipasi IKM dalam perekonomian daerah	Persentase industri kecil dan menengah yang aktif (%)	0	49,5	50,72	51,45	53,58	55,38	57,54	
		Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Tingkat pertumbuhan industri kecil dan menengah (%)	3,77	1,5	4,5	5,2	6	6,9	7,9	
		Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah" (Angka)	91,94	91	91,94	91,94	91,94	91,94	91,94	

Indikator keberhasilan dari tujuan adalah Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja dan Rasio PDRB Industri Pengolahan dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang berkualitas dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK);
2. Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja dengan indikator Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. Meningkatnya partisipasi IKM dalam perekonomian daerah dengan indikator Persentase Industri Kecil dan Menengah yang aktif;
4. Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah dengan indikator Tingkat pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah; dan
5. Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dengan indikator IKM Perangkat Daerah.

3.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1 Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi

kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI	Wonogiri Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan		
MISI	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing serta memperkuat sektor perindustrian di Kabupaten Wonogiri; dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yang baik	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang berkualitas	Mengembangkan program pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar kerja	Memperkuat sinergi dengan dunia industri untuk program pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja
		Meningkatkan akses informasi lowongan kerja melalui sistem digital	Memprioritaskan pelatihan dan sertifikasi kompetensi yang diakui nasional dan internasional
	Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja	Meningkatkan sosialisasi dan implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan	Mendorong partisipasi aktif perusahaan dan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan
		Pengawasan ketat terhadap pemenuhan hak-hak tenaga kerja	Memperkuat regulasi dan penegakan hukum ketenagakerjaan inklusif dan adil
	Meningkatnya partisipasi IKM dalam perekonomian daerah	Mendorong akselerasi pengembangan IKM melalui fasilitasi perizinan dan pembiayaan	Menguatkan jejaring pemasaran dan daya saing IKM di pasar lokal dan nasional
		Meningkatkan kapasitas IKM dalam pengelolaan usaha dan inovasi produk	Mendukung pemasaran digital dan penggunaan teknologi untuk pengembangan produk IKM
	Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Menyediakan insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku industri kecil dan menengah	Meningkatkan pengembangan klaster industri untuk memacu efisiensi dan kolaborasi antar usaha
		Meningkatkan pelatihan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di sektor industri	Mendorong investasi dan kemitraan strategis dalam pengembangan industri berorientasi ekspor

**Tabel 3.3 Penahapan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029**

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Lokus Strategi: Seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri dan UPTD BLK Wonogiri Tahapan Strategi: 1. Penguatan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan tenaga kerja dan industri kecil menengah (IKM), termasuk perlindungan tenaga kerja dan UMKM. 2. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berbasis kompetensi serta dukungan infrastruktur pelatihan yang memadai (misal BLK). 3. Optimalisasi kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan pendidikan. 4. Implementasi teknologi dan inovasi pada industri kecil dan menengah. 5. Evaluasi dan penguatan sistem monitoring & evaluasi untuk memastikan pencapaian target.	Lokus Strategi: Wilayah Kabupaten dan sektor Industri Kecil Menengah Tahapan Strategi: 1. Lanjutan penguatan kebijakan dan regulasi. 2. Peningkatan berkelanjutan kapasitas SDM dan infrastruktur pelatihan. 3. Penguatan kolaborasi multi pemangku kepentingan. 4. Perluasan penerapan teknologi dan inovasi di industri kecil dan menengah. 5. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi program dan kebijakan.	Lokus Strategi: Fokus pada penguatan klaster industri dan pelatihan vokasi Tahapan Strategi: 1. Konsolidasi dan peningkatan implementasi kebijakan dan regulasi terkait ketenagakerjaan dan industri. 2. Optimalisasi pelatihan berbasis kompetensi yang relevan dan didukung infrastruktur. 3. Memantapkan kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta. 4. Adaptasi teknologi terbaru dan peningkatan inovasi produk dan proses di industri. 5. <i>Review</i> dan peningkatan sistem monitoring dan evaluasi.	Lokus Strategi: Pengembangan kerjasama jangka panjang sektor industri dan pendidikan Tahapan Strategi: 1. Penguatan regulasi berkelanjutan. 2. Inovasi dan peningkatan kualitas program pelatihan dan fasilitas pendukungnya. 3. Pembangunan kemitraan jangka panjang dengan sektor pemerintah, swasta, dan pendidikan. 4. Penerapan teknologi maju untuk efisiensi dan inovasi industri kecil dan menengah. 5. Penilaian dan revisi sistem monitoring yang responsif dan adaptif.	Lokus Strategi: Evaluasi menyeluruh Kabupaten dan pengembangan inovasi berkelanjutan Tahapan Strategi: 1. Evaluasi dan penyempurnaan kebijakan dan regulasi berdasarkan hasil evaluasi terdahulu. 2. Pelestarian dan pengembangan kapasitas SDM dengan pendekatan inovatif. 3. Penguatan sinergi sektoral dan inovasi program kemitraan. 4. Mendukung inovasi berkelanjutan serta penerapan teknologi terkini di sektor industri. 5. Penyempurnaan mekanisme evaluasi berkala dan monitoring kinerja secara berkesinambungan.

3.2.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri. Arah kebijakan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri berdasarkan tabel 3.2 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat sinergi dengan dunia industri untuk program pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja;
2. Memprioritaskan pelatihan dan sertifikasi kompetensi yang diakui nasional dan internasional;
3. Mendorong partisipasi aktif perusahaan dan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan;
4. Memperkuat regulasi dan penegakan hukum ketenagakerjaan inklusif dan adil;
5. Memperkuat jejaring pemasaran dan daya saing IKM di pasar lokal dan nasional;
6. Mendukung pemasaran digital dan penggunaan teknologi untuk pengembangan produk IKM;
7. Meningkatkan pengembangan klaster industri untuk memacu efisiensi dan kolaborasi antar usaha; dan

8. Mendorong investasi dan kemitraan strategis dalam pengembangan industri berorientasi ekspor.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN OPD

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah memerlukan penjabaran berupa upaya-upaya dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Strategi adalah rencana tindakan komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, dijabarkan dalam program Perangkat Daerah. Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma Standar Prosedur Kerja (NSPK) yang dituangkan dalam Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan selain mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dilaksanakan oleh Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja; Bidang Perindustrian, dan UPTD BLK serta didukung oleh Sekretariat. Sekretariat berperan dalam memberikan dukungan operasional, dukungan administrasi serta menyiapkan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.

Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				8.073.152.000		8.073.152.000		8.073.152.000		8.073.152.000		8.073.152.000		
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.193.910.000		7.193.910.000		7.193.910.000		7.193.910.000		7.193.910.000		
Meningkatnya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	2	1	7.193.910.000	1	7.193.910.000	1	7.193.910.000	1	7.193.910.000	1	7.193.910.000	2.07.3.32.3.31.10.00 00 - DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100		100		100		100		100			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	78,3	78,6		79		79,3		79,7		80			
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	37	40		41		41		42		42			
2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.999.000		9.999.000		9.999.000		9.999.000		9.999.000		
Meningkatnya penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	9.999.000	5	9.999.000	5	9.999.000	5	9.999.000	5	9.999.000		
2.07.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9.999.000		9.999.000		9.999.000		9.999.000		9.999.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	9.999.000	5	9.999.000	5	9.999.000	5	9.999.000	5	9.999.000		
2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.467.904.000		6.467.904.000		6.467.904.000		6.467.904.000		6.467.904.000		
Meningkatnya administrasi keuangan daerah yang disusun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	38	42	6.467.904.000	42	6.467.904.000	42	6.467.904.000	42	6.467.904.000	42	6.467.904.000		
2.07.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.467.904.000		6.467.904.000		6.467.904.000		6.467.904.000		6.467.904.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	38	42	6.467.904.000	42	6.467.904.000	42	6.467.904.000	42	6.467.904.000	42	6.467.904.000		
2.07.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.100.000		1.100.000		1.100.000		1.100.000		1.100.000		
Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	19	5	1.100.000	5	1.100.000	5	1.100.000	5	1.100.000	5	1.100.000		
2.07.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				1.100.000		1.100.000		1.100.000		1.100.000		1.100.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	19	5	1.100.000	5	1.100.000	5	1.100.000	5	1.100.000	5	1.100.000		
2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				67.469.000		67.469.000		67.469.000		67.469.000		67.469.000		
Meningkatnya fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	30	8	67.469.000	8	67.469.000	8	67.469.000	8	67.469.000	8	67.469.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	11	11		11		11		11		11			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	42	24		24		24		24		24			
2.07.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	4.000.000	6	4.000.000	6	4.000.000	6	4.000.000	6	4.000.000		
2.07.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.799.000		10.799.000		10.799.000		10.799.000		10.799.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	10.799.000	6	10.799.000	6	10.799.000	6	10.799.000	6	10.799.000		
2.07.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				3.999.000		3.999.000		3.999.000		3.999.000		3.999.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	30	8	3.999.000	8	3.999.000	8	3.999.000	8	3.999.000	8	3.999.000		
2.07.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	11	11	10.000.000	11	10.000.000	11	10.000.000	11	10.000.000	11	10.000.000		
2.07.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				38.671.000		38.671.000		38.671.000		38.671.000		38.671.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	42	24	38.671.000	24	38.671.000	24	38.671.000	24	38.671.000	24	38.671.000		
2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Meningkatnya pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000		
2.07.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000		
2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				548.981.000		548.981.000		548.981.000		548.981.000		548.981.000		
Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36	548.981.000	36	548.981.000	36	548.981.000	36	548.981.000	36	548.981.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	19		19		19		19		19			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7	7		7		7		7		7			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7	7	1.000.000	7	1.000.000	7	1.000.000	7	1.000.000	7	1.000.000		
2.07.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				151.800.000		151.800.000		151.800.000		151.800.000		151.800.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36	151.800.000	36	151.800.000	36	151.800.000	36	151.800.000	36	151.800.000		
2.07.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				396.181.000		396.181.000		396.181.000		396.181.000		396.181.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	19	396.181.000	19	396.181.000	19	396.181.000	19	396.181.000	19	396.181.000		
2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				63.457.000		63.457.000		63.457.000		63.457.000		63.457.000		
Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	20	63.457.000	20	63.457.000	20	63.457.000	20	63.457.000	20	63.457.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	35	31		31		31		31		31			
2.07.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				39.999.000		39.999.000		39.999.000		39.999.000		39.999.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	35	31	39.999.000	31	39.999.000	31	39.999.000	31	39.999.000	31	39.999.000		
2.07.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	20	3.000.000	20	3.000.000	20	3.000.000	20	3.000.000	20	3.000.000		
2.07.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				17.960.000		17.960.000		17.960.000		17.960.000		17.960.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	17.960.000	2	17.960.000	2	17.960.000	2	17.960.000	2	17.960.000		
2.07.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.498.000		2.498.000		2.498.000		2.498.000		2.498.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	12	2.498.000	12	2.498.000	12	2.498.000	12	2.498.000	12	2.498.000		
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				4.159.000		4.159.000		4.159.000		4.159.000		4.159.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	77,78	77,78	4.159.000	77,78	4.159.000	77,78	4.159.000	77,78	4.159.000	77,78	4.159.000	2.07.3.32.3.31.10.00 00 - DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				4.159.000		4.159.000		4.159.000		4.159.000		4.159.000		
Meningkatnya penyusunan dokumen RTK	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	5	6	4.159.000	7	4.159.000	8	4.159.000	9	4.159.000	10	4.159.000		
	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				3.159.000		3.159.000		3.159.000		3.159.000		3.159.000		
Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	5	6	3.159.000	7	3.159.000	8	3.159.000	9	3.159.000	10	3.159.000		
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				716.770.000		716.770.000		716.770.000		716.770.000		716.770.000		
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	40,14	1,8	716.770.000	1,92	716.770.000	2	716.770.000	2,05	716.770.000	2,1	716.770.000	2.07.3.32.3.31.10.00 00 - DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				710.771.000		710.771.000		710.771.000		710.771.000		710.771.000		
Meningkatnya Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	5	1	710.771.000	8	710.771.000	5	710.771.000	6	710.771.000	8	710.771.000		
	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n (Kesepakatan)	12	10		10		10		10					
	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	3.028	3.095		3.105		3.115		3.125		3.135			
2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				645.643.000		645.643.000		645.643.000		645.643.000		645.643.000		
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	3.028	3.095	645.643.000	3.105	645.643.000	3.115	645.643.000	3.125	645.643.000	3.135	645.643.000		
2.07.03.2.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota				49.999.000		49.999.000		49.999.000		49.999.000		49.999.000		
Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	5	1	49.999.000	8	49.999.000	5	49.999.000	6	49.999.000	8	49.999.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.03.2.01.0006 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas				15.129.000		15.129.000		15.129.000		15.129.000		15.129.000		
Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n (Kesepakatan)	12	10	15.129.000	10	15.129.000	10	15.129.000	10	15.129.000	10	15.129.000		
2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				2.999.000		2.999.000		2.999.000		2.999.000		2.999.000		
Meningkatnya program pelatihan yang sudah link and match dengan perusahaan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	37	37	2.999.000	37	2.999.000	37	2.999.000	37	2.999.000	37	2.999.000		
2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				2.999.000		2.999.000		2.999.000		2.999.000		2.999.000		
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	37	37	2.999.000	37	2.999.000	37	2.999.000	37	2.999.000	37	2.999.000		
2.07.03.2.03 - Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Meningkatnya LPK yang Memiliki Perizinan	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan)	10	10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000		
2.07.03.2.03.0001 - Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan)	10	10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000		
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				133.441.000		133.441.000		133.441.000		133.441.000		133.441.000		
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota (%)	78,72	79,25	133.441.000	79,5	133.441.000	79,75	133.441.000	80	133.441.000	80,25	133.441.000	2.07.3.32.3.31.10.00 - DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				89.302.000		89.302.000		89.302.000		89.302.000		89.302.000		
Meningkatnya pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	1.780	1.200	89.302.000	1.200	89.302.000	1.200	89.302.000	1.200	89.302.000	1.200	89.302.000		
	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)	40	39		39		39		39					
	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	7.509	7.150		7.155		7.160		7.165		7.170			
2.07.04.2.01.0002 - Pelayanan antar Kerja				25.226.000		25.226.000		25.226.000		25.226.000		25.226.000		
Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	7.509	7.150	25.226.000	7.155	25.226.000	7.160	25.226.000	7.165	25.226.000	7.170	25.226.000		
2.07.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				33.711.000		33.711.000		33.711.000		33.711.000		33.711.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	1.780	1.200	33.711.000	1.200	33.711.000	1.200	33.711.000	1.200	33.711.000	1.200	33.711.000		
2.07.04.2.01.0004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan				30.365.000		30.365.000		30.365.000		30.365.000		30.365.000		
Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)	40	39	30.365.000	39	30.365.000	39	30.365.000	39	30.365.000	39	30.365.000		
2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				39.140.000		39.140.000		39.140.000		39.140.000		39.140.000		
Meningkatnya Lowongan Kerja yang Bisa Dibangun Link and Match nya	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	1.257	1.000	39.140.000	1.020	39.140.000	1.050	39.140.000	1.070	39.140.000	1.100	39.140.000		
	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	12	12				12		12					
	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	790	575				575		575					
2.07.04.2.03.0001 - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				9.999.000		9.999.000		9.999.000		9.999.000		9.999.000		
Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	12	12	9.999.000	12	9.999.000	12	9.999.000	12	9.999.000	12	9.999.000		
2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				2.365.000		2.365.000		2.365.000		2.365.000		2.365.000		
Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	1.257	1.000	2.365.000	1.020	2.365.000	1.050	2.365.000	1.070	2.365.000	1.100	2.365.000		
2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja				26.776.000		26.776.000		26.776.000		26.776.000		26.776.000		
Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	790	575	26.776.000	575	26.776.000	575	26.776.000	575	26.776.000	575	26.776.000		
2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				4.999.000		4.999.000		4.999.000		4.999.000		4.999.000		
Meningkatnya Pencari Kerja Migran yang Ditempatkan	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	15	16	4.999.000	16	4.999.000	16	4.999.000	16	4.999.000	16	4.999.000		
2.07.04.2.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)				4.999.000		4.999.000		4.999.000		4.999.000		4.999.000		
Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	15	16	4.999.000	16	4.999.000	16	4.999.000	16	4.999.000	16	4.999.000		
2.07.04.2.05 - Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Meningkatnya TKA yang Terdata				0		0		0		0		0		
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				24.872.000		24.872.000		24.872.000		24.872.000		24.872.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pekerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	18,5	18,7	24.872.000	18,9	24.872.000	19,1	24.872.000	19,3	24.872.000	19,5	24.872.000	2.07.3.32.3.31.10.00 00 - DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				6.019.000		6.019.000		6.019.000		6.019.000		6.019.000		
Meningkatnya Perusahaan yang mempunyai sarana HI	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	10	10	6.019.000	11	6.019.000	11	6.019.000	11	6.019.000	11	6.019.000		
	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	10	10	3.000.000	11	3.000.000	11	3.000.000	11	3.000.000	11	3.000.000		
2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				3.019.000		3.019.000		3.019.000		3.019.000		3.019.000		
Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	1	1	3.019.000	1	3.019.000	1	3.019.000	1	3.019.000	1	3.019.000		
2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				18.853.000		18.853.000		18.853.000		18.853.000		18.853.000		
Meningkatnya Perusahaan yang menindaklanjuti pembinaan ketenagakerjaan	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	2.895	2.800	18.853.000	2.825	18.853.000	2.850	18.853.000	2.900	18.853.000	2.925	18.853.000		
	Jumlah Perselisihan yang Dioegah (Perkara)	50	51		51		51		51		51			
	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1	1		1		1		1		1			
2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4.197.000		4.197.000		4.197.000		4.197.000		4.197.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	50	51	4.197.000	51	4.197.000	51	4.197.000	51	4.197.000	51	4.197.000		
2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	3	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000		
2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota				10.497.000		10.497.000		10.497.000		10.497.000		10.497.000		
Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1	1	10.497.000	1	10.497.000	1	10.497.000	1	10.497.000	1	10.497.000		
2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				1.159.000		1.159.000		1.159.000		1.159.000		1.159.000		
Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	2.695	2.800	1.159.000	2.825	1.159.000	2.850	1.159.000	2.900	1.159.000	2.925	1.159.000		
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				49.272.000		49.272.000		49.272.000		49.272.000		49.272.000		
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				23.775.000		23.775.000		23.775.000		23.775.000		23.775.000		
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)	17,75	17,85	23.775.000	17,9	23.775.000	17,95	23.775.000	18	23.775.000	18,05	23.775.000	2.07.3.32.3.31.10.00 00 - DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				23.775.000		23.775.000		23.775.000		23.775.000		23.775.000		
Meningkatnya persentase IKM yang diberdayakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1	1	23.775.000	1	23.775.000	1	23.775.000	1	23.775.000	1	23.775.000		
3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				23.775.000		23.775.000		23.775.000		23.775.000		23.775.000		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1	1	23.775.000	1	23.775.000	1	23.775.000	1	23.775.000	1	23.775.000		
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				10.129.000		10.129.000		10.129.000		10.129.000		10.129.000		
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	0	100	10.129.000	100	10.129.000	100	10.129.000	100	10.129.000	100	10.129.000	2.07.3.32.3.31.10.00 00 - DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Idstri Menengah Yang dilakukan oleh Instansi terkait (%)	44,44	48,45		50,45		52,45		54,45		56,45			
3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				10.129.000		10.129.000		10.129.000		10.129.000		10.129.000		
Meningkatnya penerbitan Ijin Usaha Industri (IUI)	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1	1	10.129.000	1	10.129.000	1	10.129.000	1	10.129.000	1	10.129.000		
	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota				5.363.000		5.363.000		5.363.000		5.363.000		5.363.000		
Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1	1	5.363.000	1	5.363.000	1	5.363.000	1	5.363.000	1	5.363.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)				4.768.000		4.768.000		4.768.000		4.768.000		4.768.000		
Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1	1	4.768.000	1	4.768.000	1	4.768.000	1	4.768.000	1	4.768.000		
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				15.368.000		15.368.000		15.368.000		15.368.000		15.368.000		
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	100	100	15.368.000	100	15.368.000	100	15.368.000	100	15.368.000	100	15.368.000	2.07.3.32.3.31.10.00 00 - DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				15.368.000		15.368.000		15.368.000		15.368.000		15.368.000		
Meningkatnya cakupan wilayah informasi industri	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	1	1	15.368.000	1	15.368.000	1	15.368.000	1	15.368.000	1	15.368.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	1	1		1		1		1					
3.31.04.2.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	1	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31.04.2.01.0002 - Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				9.368.000		9.368.000		9.368.000		9.368.000		9.368.000		
Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	1	1	9.368.000	1	9.368.000	1	9.368.000	1	9.368.000	1	9.368.000		

**Tabel 4.2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung
Program Prioritas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.07.3.32.3.31.10.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN				
1.	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
			2.07.03.2.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wonogiri 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.07.3.32.3.31.10.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN									
2.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	37,53	37,75	38	38,25	38,4	38,64	38,82	
3.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	17,75	17,8	17,85	17,9	17,95	18	18,05	

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wonogiri 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.07.3.32.3.31.10.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN										
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	37,53	37,75	38	38,25	38,4	38,64	38,82	
2	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	35,25	52,00	56,71	59,05	62,74	66	68,04	
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	17,75	17,8	17,85	17,9	17,95	18	18,05	
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	67,63	70,35	70,5	71,7	72,7	73,9	74,9	
3	Persentase industri kecil dan menengah yang aktif	%	0	49,5	50,72	51,45	53,58	55,38	57,54	
4	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	97,6	98,7	97,65	97,68	97,7	97,73	97,75	
5	Tingkat pertumbuhan industri kecil dan menengah	%	3,77	1,5	4,5	5,2	6	6,9	7,9	
6	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%	17,75	17,8	17,85	17,9	17,95	18	18,05	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	IKM Perangkat Daerah"	Angka	91,94	91	91,94	91,94	91,94	91,94	91,94	
IV	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	%	78,72	58,03	79,25	79,5	79,75	80	80,25	
2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	18,5	13	18,7	18,9	19,1	19,3	19,5	
3	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah Yang dilakukan oleh Instansi terkait	%	44,44	5	48,45	50,45	52,45	54,45	56,45	
4	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	0,56	100	100	100	100	100	
5	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	
6	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	40,14	1,24	1,8	1,92	2	2,05	2,1	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
7	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	100	100	100	100	100	100	
8	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	37,53	37,75	38	38,25	38,4	38,64	38,82	
9	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	%	4,5	4,87	5,8	6,6	7,75	8,6	9,54	
10	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri termasuk turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	Karena di Kabupaten Wonogiri belum terdapat kawasan industri

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wonogiri 2025-2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
2.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	positif	%	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	
3.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	positif	%	40,14	1,24	1,8	1,92	2	2,05	2,1	
4.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	positif	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	37,53	37,75	38,00	38,25	38,40	38,64	38,82	
5.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	positif	%	18,5	13	18,7	18,9	19,1	19,3	19,5	
6.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	positif	%	78,72	58,03	79,25	79,5	79,75	80	80,25	
7.	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
8.	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	positif	%	4,5	4,87	5,8	6,6	7,75	8,6	9,54	
9.	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri termasuk turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
10.	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dilakukan oleh Instansi terkait	positif	%	44,44	5	48,45	50,45	52,45	54,45	56,45	
11.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	positif	%	0	100	100	100	100	100	100	
12.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Karena di Kabupaten Wonogiri belum terdapat kawasan industri
13.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	positif	%	100	0,58	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN PENTING SUSBTANSIAL

Rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kabupaten Wonogiri untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan dan perindustrian dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri 2025-2029. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.

Permasalahan ketenagakerjaan dan perindustrian sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri. Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota. Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistem pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen,

tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan ketenagakerjaan dan perindustrian secara optimal dan terpadu. Harapannya Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kabupaten Wonogiri.

5.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri berpedoman pada Permendagri nomor 86 Tahun 2017 dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonogiri berpedoman pada RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri sebagai perangkat daerah yang mengurus ketenagakerjaan dan perindustrian dengan sasaran meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang berkualitas; meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja; meningkatnya partisipasi IKM dalam perekonomian daerah; meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah; dan meningkatnya kinerja Perangkat Daerah. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri memuat program, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan indikator kinerja dengan target, serta pendanaan tahun 2025-2029.

5.3 PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN PEMERINTAH DAERAH

Evaluasi dan Monitoring dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dilakukan melalui Evaluasi Ex Ante (Penilaian dilakukan sebelum kegiatan atau program dilaksanakan), Evaluasi Midterm (Evaluasi formatif, menilai program/ kegiatan yang diimplementasikan), Evaluasi Final or Terminal (Evaluasi sumatif karena dilakukan menjelang akhir pelaksanaan kegiatan atau program), Evaluasi Ex Post (Evaluasi Ketika program/ kegiatan selesai dilakukan). Rencana Tindak Lanjut pada dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri merupakan rencana kegiatan yang akan dilakukan setelah melakukan evaluasi dari kegiatan sebelumnya.

5.4 MANAJEMEN RISIKO

Tabel 5.1 Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Pernyataan Risiko	Sebab	Dampak	Skala Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko	Target Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang berkualitas	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Rendahnya keterlibatan perempuan dalam pasar kerja	- Ketrampilan terbatas - Kurangnya akses pelatihan - Stereotip gender	- Tingginya pengangguran - Ketimpangan gender	6	- Menggalakkan program pelatihan berbasis kompetensi - Meningkatkan kerjasama dengan perusahaan khususnya yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja perempuan	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Wonogiri	2026-2029
		Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Rendahnya kesempatan kerja	Terbatasnya investasi dan peluang usaha	Tingginya angka pengangguran	6	- Kegiatan Job Fair - Pelatihan Vokasi	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Wonogiri	2026-2029
2	Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Rendahnya kepatuhan pemberi kerja/perusahaan mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan	Masih minimnya sosialisasi tentang jaminan sosial ketenagakerjaan	Banyak tenaga kerja belum ikut dalam kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	6	Menggalakkan sosialisasi tentang kepesertaan jamsostek kepada tenaga kerja	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Wonogiri	2026-2029
3	Meningkatnya partisipasi IKM	Persentase Industri kecil	Menurunnya persentase IKM yang	1. Rendahnya daya saing IKM	1. Penurunan kontribusi IKM	6	1. Pemetaan dan monitoring berkala	1. Direktorat Jenderal	1. Program penguatan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Pernyataan Risiko	Sebab	Dampak	Skala Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko	Target Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dalam perekonomian daerah	dan menengah yang aktif	masih aktif secara signifikan dalam kurun waktu tertentu, yang dapat berdampak pada stabilitas sektor industri dan perekonomian daerah	dalam menghadapi persaingan pasar, khususnya pasca pandemi; 2. Keterbatasan akses pembiayaan dan permodalan; 3. Minimnya transformasi digital dan adopsi teknologi oleh IKM; 4. Terbatasnya akses ke pasar nasional maupun ekspor; 5. Rendahnya tingkat regenerasi penerus usaha	terhadap PDB sektor industri non-migas; 2. Berkurangnya penyerapan tenaga kerja, khususnya di sektor informal dan lokal; 3. Meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di daerah basis IKM; 4. Terhambatnya pengembangan industri daerah; 5. Potensi kehilangan kekayaan intelektual lokal dan warisan budaya industri		terhadap status aktif/tidaknya IKM melalui basis data; 2. Digitalisasi IKM melalui pelatihan, adopsi e-commerce, dan sistem ERP sederhana; 3. Peningkatan kapasitas SDM IKM melalui pelatihan teknis, manajerial, dan inovasi produk; 4. Fasilitasi kemitraan usaha antara IKM dan industri besar (IKM sebagai bagian dari rantai pasok); 5. Peningkatan akses pasar melalui program promosi, pameran, dan penguatan branding produk IKM.	Industri Kecil, Menengah, dan Aneka – Kementerian Perindustrian; 2. Dinas yang membidangi Perindustrian Provinsi/ Kabupaten/ Kota	kapasitas dan akses pasar (0-1 tahun); 2. Pemetaan IKM tidak aktif, intervensi program prioritas pada sektor terdampak (1-3 tahun)
4	Meningkatnya pertumbuhan	Tingkat pertumbuhan	Rendahnya tingkat pertumbuhan IKM	1. Rendahnya minat	1. Penurunan kontribusi IKM	9	1. Peningkatan program	1. Direktorat Jenderal	1. Peningkatan jumlah pelaku

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Pernyataan Risiko	Sebab	Dampak	Skala Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko	Target Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	industri kecil dan menengah	industri kecil dan menengah	yang dapat menghambat penguatan struktur industri daerah dan pencapaian target pembangunan industri	wirausaha baru akibat kurangnya insentif dan jaminan usaha; 2. Ketimpangan infrastruktur industri dan sarana produksi antar wilayah; 3. Minimnya pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam proses produksi; 4. Terbatasnya akses terhadap pembiayaan awal dan modal ekspansi.	terhadap pertumbuhan industri daerah; 2. Melemahnya regenerasi pelaku industri dan terbatasnya munculnya unit usaha baru; 3. Berkurangnya potensi penciptaan lapangan kerja baru di sektor industri kecil; 4. Menurunnya indeks kewirausahaan nasional		Wirausaha Baru (WUB) berbasis potensi daerah; 2. Insentif fiskal dan non-fiskal bagi pelaku IKM baru, termasuk bantuan peralatan dan pelatihan; 3. Penguatan kelembagaan IKM seperti koperasi produksi dan asosiasi sektor industri; 4. Penyediaan sentra IKM baru di wilayah potensi industri namun belum tergarap.	Industri Kecil, Menengah, dan Aneka – Kementerian Perindustrian; 2. Dinas yang membidangi Perindustrian Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IKM baru melalui WUB dan pelatihan kewirausahaan (1-2 tahun); 2. Integrasi IKM ke dalam ekosistem industri berbasis digital (1-2 tahun).
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	IKM Perangkat Daerah	Menurunnya nilai IKM	Tempat pelayanan yang kurang representatif	Hasil survei kepuasan masyarakat rendah	9	Digitalisasi layanan, peningkatan kualitas SDM, monitoring dan evaluasi	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Wonogiri	2026-2029

Manajemen risiko Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri pada level Sasaran Strategis. Terdapat lima sasaran yang perlu dilakukan manajemen risiko, yaitu Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang berkualitas; Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja; Meningkatnya partisipasi IKM dalam perekonomian daerah; Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah; dan Meningkatnya kinerja perangkat daerah. Lima sasaran tersebut memiliki 6 indikator sasaran, yaitu: 1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan; 2) Tingkat Kesempatan Kerja (TKK); 3) Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 4) Persentase Industri kecil dan menengah yang aktif; 5) Tingkat pertumbuhan industri kecil dan menengah; 6) IKM Perangkat Daerah

Terdapat 6 indikator sasaran yang dianalisis beserta pernyataan risiko, sebab, dampak, skala risiko, dan rencana tindak pengendalian, sebagai berikut:

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Risiko yang diidentifikasi adalah rendahnya keterlibatan perempuan dalam pasar kerja. Penyebabnya adalah ketrampilan terbatas, kurangnya akses pelatihan dan stereotip gender. Dampak yang dapat ditimbulkan adalah tingginya pengangguran dan ketimpangan gender. Risiko ini berskala 6 dan tidak perlu dilakukan tindak pengendalian.

2. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Risiko yang diidentifikasi adalah rendahnya kesempatan kerja. Penyebabnya adalah terbatasnya investasi dan peluang usaha. Dampak yang dapat ditimbulkan adalah tingginya angka pengangguran. Risiko ini berskala 6 dan tidak perlu dilakukan tindak pengendalian.

3. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Risiko yang diidentifikasi adalah rendahnya kepatuhan pemberi kerja/perusahaan mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan. Penyebabnya adalah masih minimnya sosialisasi tentang jaminan sosial ketenagakerjaan. Dampak yang dapat ditimbulkan adalah Banyak tenaga kerja belum

ikut dalam kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Risiko ini berskala 6 dan tidak perlu dilakukan tindak pengendalian.

4. Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Aktif

Risiko yang diidentifikasi adalah rendahnya tingkat pertumbuhan IKM yang dapat menghambat penguatan struktur industri daerah dan pencapaian target pembangunan industri. Penyebabnya adalah rendahnya minat wirausaha baru akibat kurangnya insentif dan jaminan usaha; ketimpangan infrastruktur industri dan sarana produksi antar wilayah; minimnya pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam proses produksi; terbatasnya akses terhadap pembiayaan awal dan modal ekspansi. Dampak yang dapat ditimbulkan adalah penurunan kontribusi IKM terhadap pertumbuhan industri daerah; melemahnya regenerasi pelaku industri dan terbatasnya munculnya unit usaha baru; berkurangnya potensi penciptaan lapangan kerja baru di sektor industri kecil; menurunnya indeks kewirausahaan nasional. Risiko ini berskala 9 dan perlu dilakukan tindak pengendalian.

5. Tingkat Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah

Risiko yang diidentifikasi adalah Rendahnya tingkat pertumbuhan IKM yang dapat menghambat penguatan struktur industri daerah dan pencapaian target pembangunan industri. Penyebabnya adalah rendahnya minat wirausaha baru akibat kurangnya insentif dan jaminan usaha; ketimpangan infrastruktur industri dan sarana produksi antar wilayah; minimnya pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam proses produksi; terbatasnya akses terhadap pembiayaan awal dan modal ekspansi. Dampak yang dapat ditimbulkan adalah penurunan kontribusi IKM terhadap pertumbuhan industri daerah; melemahnya regenerasi pelaku industri dan terbatasnya munculnya unit usaha baru; berkurangnya potensi penciptaan lapangan kerja baru di sektor industri kecil; menurunnya indeks kewirausahaan nasional. Risiko ini berskala 9 dan perlu dilakukan tindak pengendalian.

6. IKM Perangkat Daerah

Risiko yang diidentifikasi adalah menurunnya nilai IKM. Penyebabnya adalah tempat pelayanan yang kurang representatif. Dampak yang dapat ditimbulkan adalah hasil survei kepuasan masyarakat rendah. Risiko ini berskala 9 dan perlu dilakukan tindak pengendalian.

Berkaitan dengan Perubahan RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri tahun 2025-2029 diperlukan dukungan, kesungguhan, tanggungjawab, semangat gotong royong, komitmen, serta peran aktif semua pihak di Kabupaten Wonogiri dalam mewujudkan visi Pembangunan daerah yaitu Mewujudkan Wonogiri Yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.